

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP PRNGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN
PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2016-2019**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akutansi Syariah



IAIN JEMBER

Oleh :

M. Wildan Virdausi
NIM: E20163008

Dosen Pembimbing:

Daru Anondo, S.E., M.Si
NIP: 197503032009011009

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JULI 2021**

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP PRNGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN
PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2016-2019**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akutansi Syariah

Oleh:

M. Wildan Virdausi
NIM: E20163008

Disetujui Pembimbing



Daru Anondo, S.E., MSi.
NIP: 197503032009011009

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP PRNGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN
PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2016-2019**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Progam Studi Akutansi Syariah

Hari: Selasa
Tanggal: 06 Juli 2021

Tim Penguji

Ketua



Toton Fanshurna, MEI
Nip. 198112242011011008

Sekretaris



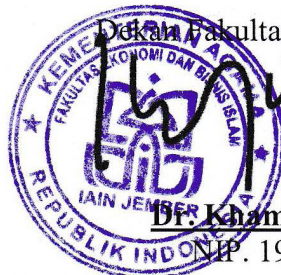
Nadia Azalia P, SE., M.M
Nip. 199403042019032019

Anggota

1. **Dr. Nurul Widyawati LR., M.Si** ()
2. **Daru Anondo, SE. M. Si.** ()

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Khamsan Rifa'i, S.E., M.Si
Nip. 196808072000031001

MOTTO

عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَ
إِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari ‘Abdullah dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Hendaklah kalian bersikap benar/ jujur, karena kebenaran itu akan mengantarkan pada kebaikan dan kebaikan akan menyampaikan ke surga.” (HR. Muslim, 4721).¹

IAIN JEMBER

¹ HR. Muslim, 4721.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur kupanjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dan sebagai tanda terimakasih, saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Ayahanda Moh. Sholeh Dosan dan Ibunda Mardiyah tercinta yang telah membesarkan saya, mencurahkan perhatian, kasih sayang, do'a serta pengorbanan yang tiada habisnya demi kesuksesan masa depan anaknya. Terimakasih atas segalanya, semoga surge menjadi balasan atas cinta kasih dan pengorbanan yang kau berikan. Aminn.
2. Kakakku tercinta, Elly Faridayanti. Terimakasih sudah menjadi kakak terbaik dan terhebat dalam hidupku. Terikasih sudsh mengantarkanku pada titik ini. Terimakasih atas keceriaan dan selalu memberikan dukungan, materi dan semangat dalam keadaan suka maupun duka.
3. Segenap guru dan dosen yang secara sukarela memberikan transfer keilmuan dan pendidikan karakter. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan barokah, Aamiin.
4. Keluarga besar Akutansi Syariah, HMPS dan PMII yang telah memberikan dan mengajarkan pengalaman yang berarti selama menjadi mahasiswa sehingga banyak membantu dalam proses pendewasaan diri.
5. Teman-teman seperjuangan AKS'16 yang memberi warna dalam setiap kebersamaan setiap harinya baik pada saat kuliah maupun tidak.
6. Kelompok KKN posko 01 yang memberikan dukungan dan semangat untuk bisa sukses bersama.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan skripsi yang berjudul “*Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016-2019*” dapat terselesaikan dengan baik.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafa’atnya di hari kiamat kelak. Aamiin. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M. selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa’i, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.
3. Bapak Daru Anondo, S.E, M.Si. selaku Ketua Program Studi akuntansi syariah sekaligus dosen pembimbing skripsi saya, yang dengan sabar meluangkan

waktu dan pemikiran untuk memberikan ilmu dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.

4. Seluruh dosen Institut Agama Islam Negeri Jember khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahui.
5. Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Jember yang sudah menyediakan beberapa referensi buku, tesis, dan jurnal untuk menyusun skripsi ini.
6. Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 21 Juli 2021

Penulis

M. Wildan Virdausi
NIM. E20163008

ABSTRAK

M. Wildan Virdausi, Daru Anondo, S.E., M.Si. 2021 : *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016-2019.*

Penghindaran Pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Penghindaran pajak dilakukan dengan menggunakan strategi, seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan dalam ketentuan, maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. 2) Apakah dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. 3) Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. 4) Apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. 2) Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. 3) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. 4) Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang terdaftar di website Bursa efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Jumlah perusahaan perbankan yang dijadikan sampel sebanyak 25 perusahaan sehingga total sampel penelitian adalah 100. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan diolah dengan menggunakan *software* SPSS versi 22. Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2) Dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 3) Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 4) Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, dan *Tax Avoidance*.

ABSTRACT

M. Wildan Virdausi, Daru Anondo, S.E., M.Si. 2021 : *The Effect of Corporate Governance on Corporate Tax Avoidance in Banking Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2019.*

Tax Avoidance is an effort to ease the tax burden by not violating the law. Tax avoidance is carried out using strategies, such as taking advantage of exceptions and discounts permitted in the provisions, as well as taking advantage of things that have not been regulated in the applicable tax regulations.

The focus of the problems studied in this thesis are: 1) Does managerial ownership have a significant effect on corporate tax avoidance behavior. 2) Does the independent board of commissioners have a significant effect on corporate tax avoidance behavior. 3) Does managerial ownership have a significant effect on corporate tax avoidance behavior. 4) Does the audit committee have a significant effect on corporate tax avoidance behavior.

The aims of this study are: 1) To determine the effect of institutional ownership on tax avoidance. 2) To determine the effect of the independent board of commissioners on tax avoidance. 3) To determine the effect of managerial ownership on tax avoidance. 4) To find out the effect of the audit committee on tax avoidance.

This study is a quantitative study using secondary data obtained from the annual financial statements listed on the Indonesia Stock Exchange website. The sampling technique of this study used the purposive sampling technique. The number of banking companies that were sampled were 25 companies so that the total research sample was 100. The data were analyzed using multiple linear regression analysis and processed using SPSS version 22 software. This study concluded 1) Institutional ownership has no effect on tax avoidance. 2) Independent commissioners have no significant influence on tax avoidance. 3) Managerial ownership has no significant effect on tax avoidance. 4) The audit committee has no significant effect on tax avoidance.

Keywords: Institutional Ownership, Independent Board of Commissioners, Managerial Ownership, Audit Committee, and Tax Avoidance.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
1. Variabel Penelitian	9
2. Indikator Variabel	10
F. Definisi Operasional.....	11
1. Kepemilikan Institusional	11
2. Dewan Komisaris Independen	11
3. Kepemilikan Manajerial.....	12
4. Komite Audit.....	13
5. Penghindaran Pajak	13
G. Asumsi Penelitian	14
H. Hipotesis.....	15
I. Metode Penelitian.....	19
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	19

2. Populasi dan Sampel	19
3. Variabel Penelitian	20
4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	20
5. Analisis Data	21
a. Analisis data deskriptif	21
b. Analisis data	22
J. Sistematika Pembahasan	28
BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	30
B. Kajian Teori	40
BAB III : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Obyek Penelitian	57
B. Penyajian Data	57
C. Analisis dan Pengujian Hipotesis	60
D. Pembahasan	75
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	
1. Matrik Penelitian	
2. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	
3. Surat Permohonan Izin Penelitian	
4. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
5. Jurnal Penelitian	
6. Output SPSS	
7. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indikator Penelitian	10
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian	38
Tabel 3.1 Kriteria Pengambilan Sampel	58
Tabel 3.2 Daftar Nama Perusahaan Yang Menjadi Sampel Penelitian.....	59
Tabel 3.3 Hasil Statistik Deskriptif	60
Tabel 3.4 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	63
Tabel 3.5 Hasil Pengujian Multikolinearitas.....	64
Tabel 3.6 Model Summary dan Hasil Pengujian Asumsi Non-Autokorelasi .	67
Tabel 3.7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	68
Tabel 3.8 Hasil Uji Parsial (Uji t)	71
Tabel 3.9 Hasil Uji Simultan (Uji F)	73
Tabel 3.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	75



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual	15
Gambar 3.1 Histogram	62
Gambar 3.2 Normal P-P Plot	62
Gambar 3.3 Scatterplot.....	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote.² Sedangkan menurut undang-undang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³ Istilah perbankan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998. Dalam Pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan,

² Hoggson, N. F. *Banking Through the Ages*, New York, Dodd, Mead & Company. 1926.

³ Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta:Rajawali Press. 2000.

⁴ Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta:Rajawali Press. 2000.

dan deposito. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut. Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpan deposan.⁵

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan untuk pengeluaran umum. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 pasal I dijelaskan bahwa, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan unruk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Di Indonesia pengeluaran umum maupun pendapatan di realisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu sebesar 2.310,2 triliun rupiah (93,9%) dari pagu dalam APBN 2019 sebesar 2.461,1 triliun rupiah.⁶

Pajak digunakan oleh negara untuk membayar pengeluaran umum atau untuk membiayai pengeluaran rutin, dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.⁷

⁵ Madura Jeff. Financial Market and Institutions. 5th ed. United States of America: South Western Collage Publishing: 2016.

⁶ Departemen Keuangan., 2019.

⁷ Siti Resmi, 2011. Perpajakan : Teori dan Kasus. Jakarta : Salemba Empat.

Lain halnya dengan perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang mengurangi laba perusahaan, termasuk beban pajak. Beban pajak yang tinggi inilah yang banyak mendorong perusahaan untuk melakukan pengurangan beban pajak.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak inilah yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak adalah usaha mengurangi pajak dengan tetap mempertahankan dan mematuhi peraturan yang ada. Penghindaran pajak dilakukan dengan menggunakan strategi, seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan dalam ketentuan, maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku.⁸

Praktik penghindaran pajak banyak dilakukan dalam transaksi bisnis lintas negara yang dilakukan oleh antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Industri perbankan Indonesia juga terlepas dari isu penghindaran pajak. Dalam menjalankan fungsi intermediernya, potensi penghindaran pajak dalam industri perbankan kemungkinan dapat terjadi dalam konteks:⁹ (i) bank sebagai pelaku penghindaran pajak dengan berbagai skema; dan (ii) bank sebagai channel yang digunakan oleh pihak ketiga untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Dalam pengawasan kewajiban perpajakan terutama terkait praktik penghindaran pajak, adanya kerahasiaan bank (*bank secrecy*) perlu mendapat

⁸ Mangunsong, Soddin. Penerapan Tax Planning Dalam Mengefisienkan Pembayaran Pajak Penghasilan. 2017.

⁹ Putranti, Titi Muswati. 2016. Jati, Wisamodoro & Tambunan, Maria. "Studi Penghindaran Pajak (Kegiatan Jasa Perbankan di Indonesia)". Study Case Indonesia.

perhatian penting. Dengan dicabutnya PER-01/PJ/2015, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengalami keterbatasan dalam pemeriksaan pajak karena kerahasiaan perbankan. Dengan adanya PER-01/PJ/2015, Direktorat Jendran Pajak dapat memperoleh informasi mengenai nasabah yang dapat dipergunakan untuk kepentingan perpajakan dan sebagai pasokan data eksternal untuk memperluas basis pajak.¹⁰ Pelanggaran terhadap kerahasiaan perbankan diyakini dapat memicu penarikan dana nasabah dan memindahkan dana tersebut ke luar negeri.

Beberapa skema yang memungkinkan terjadi atas praktik penghindaran pajak dimana bank bertindak sebagai pelaku misalnya:¹¹ (i) penerimaan pinjaman dari pihak afiliasi yang memiliki kegiatan usaha yang sama. (ii) penahanan dividen kepada pemilik saham dan (iii) pembukaan cabang di negara yang digolongkan sebagai tax haven countries.

Untuk menghindari akan terjadinya praktik-praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh pihak perusahaan, perusahaan harus memiliki *Corporate governance* yang baik. *Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan.¹² *Corporate governance* memainkan beberapa peran, seperti menjadi pengawas atas

¹⁰ Keputusan Dirjen Pajak No. PER-01/PJ/2015 tentang perubahan atas peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER -53/PJ/2009 tentang bentuk formulir surat pemberitahuan masa pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2), surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 15, pasal 22, pasal 23 dan/atau pasal 26 serta bukti pemotongan/pemungutnya.

¹¹ Jati, Wisamodro, dkk. 2015. Studi Penghindaran Pajak: Kegiatan Jasa Perbankan di Indonesia. Responsi Bank Indonesia.

¹² Haruman, Tendi. Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Keputusan Keuangan dan Nilai Perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi XI, IAI, 2016.

¹³ Abdul Wahab, N. S., & Holland, K. Tax Planning, Corporate Governance And Equity Value. *British Accounting Review*, 44(2), 111–124. 2014.

penghindaran pajak. Prosedur pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Peran lain ialah penentu keputusan penghindaran pajak.

Kondisi tata kelola perusahaan ternyata berpengaruh terhadap keputusan yang diambil perusahaan. Dalam perusahaan dengan tata kelola yang buruk, aktivitas penghindaran pajak ternyata tidak bernilai bagi pemegang saham, dan bahkan mengurangi nilai perusahaan itu sendiri.¹³ Perusahaan dengan tata kelola yang buruk, saat terjadi peningkatan keuntungan bagi manajer berupa kompensasi, mengalami penurunan tingkat penghindaran pajak, yang seharusnya dilakukan untuk pemegang saham.

Karakteristik sistem pajak perusahaan mempengaruhi nilai pengambilan keuntungan oleh manajer, dan peningkatan ketaatan pajak akan menaikkan nilai perusahaan dan mengurangi keuntungan pemegang control atas perusahaan, yaitu pemegang saham pengendali. Sedangkan di sisi lain, kualitas dari tata kelola perusahaan memainkan peran penting dalam menentukan sensitivitas penerimaan pajak pada perubahan tariff pajak. *Corporate governance* diciptakan untuk mengawasi *tax planning* ataupun *tax management* agar mampu berjalan dibawah hukum yang berlaku.¹⁴ Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit karena disatu

¹⁴ Maharani.2012.Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Perusahaan terhadap Pemilihan Auditor Eksternal. Publikasi Simposium Nasional Indonesia.

¹⁵ Zahra, Fatimatus. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹⁶ Humairah, Mufidah. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI tahun 2014-2017). Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. 2019.

sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan. Terdapat factor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya antara lain, *corporate governance*, profitabilitas, dan karakteristik eksekutif.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan hubungan antara *corporate governance* terhadap penghindaran pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan Fatimatus Zahra (2017) menjelaskan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit belum mampu membuktikan adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak.praktik keadilan.¹⁵ Sedangkan menurut Humairah Mufidah (2019) kepemilikan institusional dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.¹⁶

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian sebelumnya tentang pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Menggunakan referensi peneliti – peneliti sebelumnya. Hal ini mengingat minimnya penelitian terkait *corporate governance* dan tax avoidance yang dilakukan peneliti di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Penghindran Pajak Perusahaan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2016 - 2019”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah digunakan dalam penelitian sebagai pembatasan penelitian. Demikian permasalahan yang akan diteliti lebih fokus pada latar belakang penelitian. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan?
3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan?
4. Apakah latar belakang keahlian akuntansi atau komite audit berpengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan ditinjau dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah.¹⁷ Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan yang hendak di capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* yang diprosikan dengan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 37.

¹⁸ Murti Sumarni dan Salamah Wahyuni, *Metode Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: ANDI. 2006),

2. Untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* yang diprosikan dengan presentase dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* yang diprosikan dengan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* yang diprosikan dengan komite audit terhadap penghindaran pajak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan.¹⁸ Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap masalah yang akan diteliti. Dan juga dapat menjadi tambahan referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya mengenai masalah-masalah perpajakan khususnya mengenai penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi perpajakan dan akuntansi perbankan yaitu mengenai pentingnya pajak bagi perusahaan perbankan, bukan hanya untuk perusahaan perbankan saja melainkan bagi semua perusahaan. Dan betapa pentingnya pajak bagi negara.

b. Bagi IAIN Jember

Bagi IAIN Jember, penelitian ini diharapkan selain untuk menambah kepustakaan di IAIN Jember khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Syariah juga dapat menuai banyak manfaat dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Perusahaan

Bagi Perusahaan dapat menjadi masukan dan dorongan bahwa betapa pentingnya pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap kegiatan penghindaran pajak dalam kegiatan operasional perusahaan.

E. Ruang lingkup Penelitian

Seperti yang telah dirumuskan sebelumnya, berdasarkan rumusan masalah bahwa penelitian ini terbatas ruang dan waktu. Batasan penelitian ini dijelaskan oleh ruang lingkup penelitian yang terdiri dari variabel penelitian dan indikator penelitian yang akan dijelaskan berikut ini:

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁹ Variable pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 38.

²⁰ Nur Indriantoro, Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2016), 63

²¹ *Ibid.*, 39.

a. Variable Independen

Variable independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain.²⁰ Variabel independen pada penelitian ini adalah Kepemilikan Manajerial (x_1), Kepemilikan Institusional (x_2), Dewan Komisaris Independen (x_3), Komite Audit (x_4).

b. Variabel Dependen

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.²¹ Variabel terikat pada penelitian kali ini yaitu Penghindaran Pajak (y).

2. Indikator Variabel

Indikator penelitian adalah rujukan empiris dari variabel yang diteliti.²²

Berikut indikator variabel pada penelitian ini adalah:

Tabel 1.1
Indikator Penelitian

Variabel	Indikator
Kepemilikan Institusional	$\text{INST} = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Oleh Institusi}}{\text{Seluruh Modal Saham Perusahaan}}$
Dewan Komisaris Independen	$\text{KOI} = \frac{\text{Jumlah Anggota Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}}$
Kepemilikan Manajerial	$\text{KPM} = \frac{\text{Jumlah Saham Yang dimiliki Manajemen}}{\text{Modal Saham Perusahaan}}$

²² Tim Penyusun, *Pedoman*, 38.

²³ Tim Penyusun, *Pedoman*, 38.

Komite Audit	$\text{KOMA} = \frac{\text{Jumlah Anggota Yang Memiliki Latar Belakang Akuntansi/Keuangan}}{\text{Jumlah Anggota Komite Audit}}$
Penghindaran Pajak	$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$

Sumber: Data diolah

F. Definisi Oprasional

Definisi operasional adalah definisi yang digunakan sebagai pijakan pengukuran secara empiris secara variabel penelitian dengan rumusan yang didasarkan pada indikator variabel.²³

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens.²⁴ Kepemilikan institusional dapat menekan kecenderungan manajemen untuk memanfaatkan *discretionary* dalam laporan keuangan sehingga memberikan kualitas laba yang dilaporkan. Kepemilikan Institusional merupakan pengawas yang berasal dari luar perusahaan yang memegang saham penting dalam monitoring manajemen.

2. Dewan Komisaris Indepenen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Dewan komisaris independent merupakan

anggota komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independent. Dewan komisaris bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan direksi manajemen atas pengelolaan sumber daya perusahaan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis dalam rangka mencapai tujuan organisasi, serta memberikan nasihat bilamana diperlukan.²⁵

3. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Dikertur dan Komisaris). Besarnya kepemilikan manajerial diukur dari persentase saham yang dimiliki manajer dalam perusahaan. Bahwa kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer dengan pemegang saham. Semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajer maka manajer semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga menjadi lebih baik kinerja dari perusahaan.²⁶

²⁴ Boediono, Gideon, SB. “*Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur*”. Solo: SNA VIII. 2015.

²⁵ Darmawati. *Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Pewrusahaan*. Simposium Nasional Akuntansi VII, Denpasar. 2016.

4. Komite Audit

Komite audit sesuai dengan Kep. 29/PM/2004 adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan.²⁷ Komite audit merupakan suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota komisaris dan keberadaannya terbatas dari pengaruh direksi, eksternal auditor dan hanya bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Keberadaan dewan komite audit sangat dibutuhkan dan menjadi salah satu dari bagian tata kelola perusahaan yang paling penting yang harus dimiliki oleh perusahaan. Komite audit (KA) memiliki perandalam memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian intern.

5. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang merupakan merupakan usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku dengan cara menggunakan alternatif-alternatif yang rill yang dapat diterima oleh fiskus sehingga cara tersebut tidak melanggar undang-undang dan dapat dianggap ilegal. Penghindaran pajak dilakukan dengan tidak melanggar hukum yang berlaku, seperti ketiadaan aturan atas suatu

²⁶ Herawati, Vinola. *Peran Praktek Corporate Governance Sebagai Moderating Variabel dari Pengukuran Earnings Management terhadap Nilai Perusahaan*. Pontianak: SNA XI. 2017.

²⁷ BAPEPAM-LK. No. Kep-29/PM/2004. Tanggal 24 September 2004.

transaksi atau skema sehingga wajib pajak tidak dapat dikatakan melanggar hukum.

G. Asumsi Penelitian

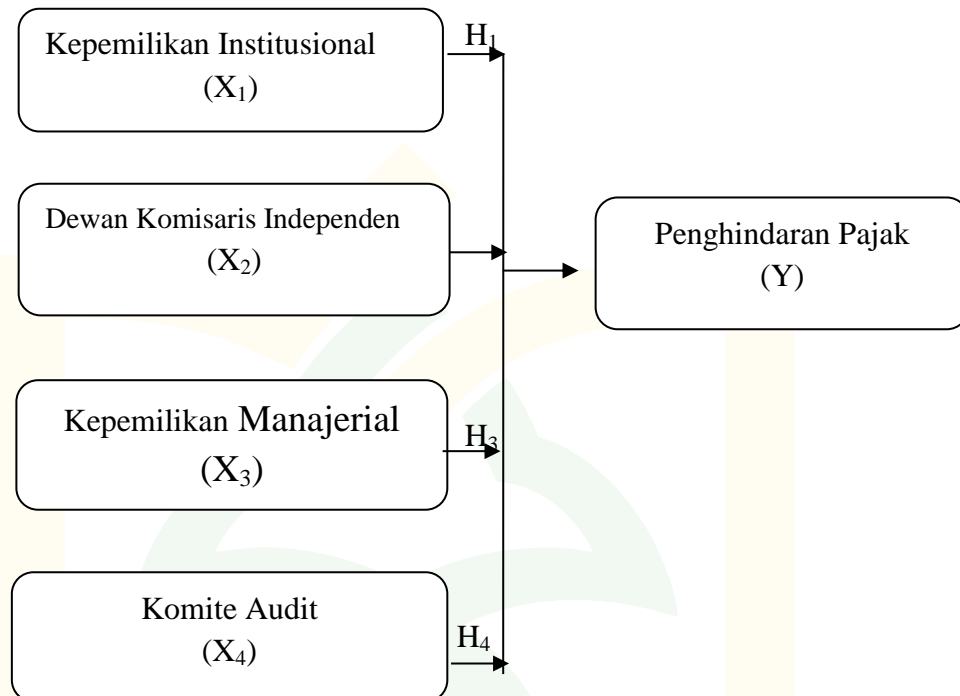
Asumsi Penelitian ini bisa disebut juga sebagai anggapan dasar, yaitu sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh peneliti. Anggapan dasar harus dirumuskan secara jelas sebelum peneliti melangkah mengumpulkan data.²⁸ Asumsi penelitian atau anggapan dasar disamping berfungsi sebagai dasar berpijak yang kukuh bagi masalah yang diteliti juga untuk mempertegas variabel yang menjadi pusat perhatian penelitian dan merumuskan hipotesis.²⁹ Asumsi pada penelitian ini yaitu ada pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manjerial, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap penghindaran pajak perusahaan.



²⁸ Waluyo, *“Perpajakan Indonesia”*. Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat. 2010.

²⁹ Suandy, Erly. *“Perencanaan Pajak”*. Jakarta: Salemba Empat. 2008.

Gambar 1.1
Kerangka Konseptual



Sumber: Data diolah

H. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan formal yang menjelaskan suatu hasil (*outcome*) dengan kata lain hipotesis adalah dugaan. Hipotesis adalah suatu proporsi dalam bentuk yang dapat diuji secara empiris. Dengan kata lain hipotesis adalah pernyataan atau proposisi yang dapat dinyatakan benar atau salah lewat uji empirik.³⁰ Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang diajukan, maka titik tolak untuk merumuskan hipotesis adalah rumusan masalah dan kerangka berfikir.³¹

Sebagai berikut hipotesis penelitian:

³⁰ Imam Ghazali, *Desain Penelitian Kuantitatif & Kualitatif untuk Akuntansi, Bisnis & Ilmu Sosial Lainnya*, Semarang: YOGA PRATAMA, 2016), 57.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 284.

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Terdapat beberapa hal yang diduga menjadi alasan mengapa besarnya kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.³² Pertama, kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi diluar kepemilikan saham dewan komisaris perusahaan. Kedua, kepemilikan institusional berfikir untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka terutama pada keuntungan laba yang akan mereka peroleh pada perusahaan. Ketiga, pemilik institusional kurang peduli dengan citra perusahaan asalkan itu bisa memaksimalkan kesejahteraan mereka walaupun adanya perilaku manajer dalam hal mengambil suatu keputusan terutama dalam hal pajak yaitu tindakan *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, komisaris independen adalah anggota komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai hubungan afiliasi dan tidak mempunyai hubungan usaha langsung maupun tidak langsung dengan emiten atau perusahaan publik.³³

³² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Pers, 2015), 39.

³³ Yuono, Citra Ayuning Sari. "Pengaruh Perencanaan Pajak dan Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 5, Nomor 6. 2016.

Semakin besar prosentase dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan menuntut manajemen bekerja lebih efektif dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan perusahaan oleh direksi dan manajer, sehingga keberadaan mereka tidak hanya menjadi simbol semata.³⁴ Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan manajerial (*manajerial ownership*) merupakan kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan.³⁵ Besarnya kepemilikan manajerial diukur dari jumlah presentase saham yang dimiliki manajer dalam perusahaan. Meningkatnya kepemilikan manajerial dalam perusahaan dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah keagenan yang ada dalam perusahaan.

Semakin besar proporsi kepemilikan oleh manajerial, dikatakan bahwa konsentrasi kepemilikan perusahaan tersebut kuat. Sebaliknya, apabila proporsi kepemilikan manajerial kecil maka mnajer hanya focus pada pengembangan kapasitas atau ukuran perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

³⁴ Annisa, N.A., & Kurniasih, L. (2016). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Vol.8, 95-189.

³⁵ Boediono, Gideon, SB. "*Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur*". Solo: Simposium Nasional Akuntansi VIII. 2015.

H₃: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

4. Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Fadhilah (2016) dalam penelitiannya menentukan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* perusahaan. Keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas yang kredibilitas pelaporan keuangan agar dapat berjalan dengan baik.³⁶ Adapun beberapa alasan komite audit perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yaitu:

Pertama, jika semakin sedikit komite audit yang dimiliki perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan oleh komite audit sangat minim sehingga akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan pajak agresif. Kedua, kredibilitas perusahaan yang memiliki komite audit sedikit atau kurang dari yang ditetapkan Bursa Efek Indonesia akan mempengaruhi integritas dan kredibilitas keuangan perusahaan bisa saja pajak agresif atau *tax avoidance* dapat dilakukan dengan mudah oleh perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

³⁶ Sriwedari, Tuti. 2015. Mekanisme Good Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

I. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian observasi tidak langsung berupa data sekunder dengan menggunakan data yang ada pada situs www.idx.co.id. Untuk menganalisis permasalahan yang ada, penulis mendata laporan tahunan yang telah diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016-2019. Menurut Kasiram penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.³⁷

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki sejumlah karakteristik umum, yang merupakan wilayah (dimana) penelitian tersebut akan digeneralisasikan.³⁸ Populasi yang akan menjadi pengamatan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

b. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari populasi yang berisi beberapa anggota dalam populasi atau elemen dari populasi yang akan membentuk sampel.³⁹ Teknik sampling pada penelitian ini adalah

³⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka baru Press, 2019), 39.

³⁸ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 119.

purposive sampling. *Purposive sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel dengan pertimbangan dan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan peneliti.⁴⁰ Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan tahunan periode 2016-2019 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Variabel Penelitian

Adapun macam-macam variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Variabel Independen atau variabel bebas

Variabel independen adalah variabel tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain.⁴¹ Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan komite audit.

b. Variabel Dependen atau variabel terikat

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel dependen. Pada penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah penghindaran pajak.

4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah

³⁹ Imam Ghozali, *Desain Penelitian*, 57.

⁴⁰ Ibid, 140.

⁴¹ Nur Indriantoro, Bambang Dupomo, *Metodologi Penelitian Bisnis.*, 63.

ada.⁴² Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2019.

b. Studi Pustaka

Dalam hal ini peneliti melakukan telaah pustaka, serta menghimpun dan mengkaji informasi-informasi yang berasal dari berbagai literasi seperti buku-buku ilmiah, laporan penelitian terdahulu, jurnal, skripsi, tesis, dan sumber-sumber yang berkaitan dengan tema penelitian oleh peneliti.

5. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan riset kausal. Riset kausal merupakan riset yang memiliki tujuan utama membuktikan hubungan sebab akibat atau hubungan mempengaruhi dan di pengaruhi dari variabel-variabel.⁴³

a. Analisis data deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagai mana adanya tanpa ada tujuan membuat kesimpulan untuk generalisasi. Statistik deskriptif digunakan untuk mengembangkan profil perusahaan yang menjadi sampel statistik deskriptif berhubungan dengan pengumpulan data, peningkatan data,

⁴² M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia, Bogor, 2017.

serta penyajian hasil peningkatan tersebut.⁴⁴ Dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif meliputi rata-rata (*mean*), ukuran penyebaran (*standar deviasi*) dan bentuk distribusi nilai minimum dan nilai maksimum data yang penentuannya menggunakan program SPSS.

b. Analisis data

1) Uji Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan model regresi yang baik maka perlu dilakukan pengujian dengan jalan memenuhi persyaratan asumsi klasik yang meliputi:⁴⁵

2) Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terkait dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal. Mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik.⁴⁶ Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti

⁴³ Istijanto. "Aplikasi Praktik Riset Pemasaran". Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2009.

⁴⁴ Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivivariate dengan Program SPSS. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

⁴⁵ Achmad Sani Supriyanto dan Masyhuri Machfudz, *Metodologi Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 252.

⁴⁶ Dr. Nur Indriantoro dan Drs. Bmbang Supomo, *Metodologi Peenelitian Bisnis untuk Akuntansi & Bisnis*, (Yogyakarta :BPFE, 2016), 63.

⁴⁷ Husein Umar, *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan: Paradigma Positivisik dan Berbasis Pemecahan Masalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 77.

⁴⁸ Ibid, 81.

arah garis diagonalnya, maka model tersebut memenuhi asumsi normalitas.⁴⁷

3) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika terdapat korelasi antara variabel independen, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal.

Salah satu cara untuk menguji gejala multikolinieritas dalam model regresi adalah dengan melihat nilai *Tolerance* (TOL) dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai VIF tidak lebih dari 10, maka model dinyatakan tidak mengandung multikolinieritas.⁴⁸

4) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi.⁴⁹ Uji heteroskedastisitas menggunakan metode analisis grafik dilakukan dengan mengamati *scatterplot* dimana sumbu horizontal menggambarkan nilai *predicated standardized*. Jika *scatterplot* membentuk pola tertentu, hal itu menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk. Sebaliknya jika *scatterplot* menyebar

secara acak maka hal itu menunjukkan tidak ada masalah heteroskedastisitas.

5) Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah suatu korelasi antara nilai variabel dengan nilai variabel yang sama pada lag satu atau lebih sebelumnya.⁵⁰ Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Dalam mendeteksi adanya autokorelasi dibuat hipotesis:

- a) H_0 : residual (res_1) random (acak)
- b) H_a : residual (res_1) tidak random.

c. Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda adalah regresi dengan dua variabel bebas (misalnya x_1 dan x_2) dan satu variabel terikat (y).⁵¹ Analisis regresi linier berganda juga merupakan alat untuk meramalkan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat, yang bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya hubungan fungsional atau hubungan kausal antara dua atau lebih variabel bebas.⁵² Adapun persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:⁵³

⁴⁹ Aminatus Zahriah, *Diktat Pengajaran Aplikasi Komputer Statistik (Teori dan Aplikasi dengan SPSS 22)*, (Jember: t.p, 2018), 78.

⁵⁰ Amos Rico Brolin, "Analisis Book Tax Differences Terhadap Pertumbuhan Laba (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)", (Skripsi : Universitas Diponegoro Semarang, 2016), 75.

⁵¹ Ibid., 76.

⁵² Nugroho, Agung. "Strategi Jitu Memilih Metode Statistic Penelitian dengan SPSS". Yogyakarta: Andi. 200.

⁵³ Zahriyah, *Diktat Pengajaran*, 54.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Dimana:

$Y = \text{Tax Avoidance}$

$\alpha = \text{Harga } Y \text{ bila } X = 0 \text{ (harga konstan)}$

$\beta = \text{Koefisien regresi}$

$X_1 = \text{Kepemilikan institusional}$ $X_4 = \text{Komite Audit}$

$X_2 = \text{Dewan komisaris independen}$ $e = \text{Standar error}$

$X_3 = \text{Kepemilikan manajerial}$

d. Uji Hipotesis

1) Analisis Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t digunakan untuk membandingkan rata-rata dua populasi dengan data yang berskala interval.⁵⁴ Adapun langkah-langkah dalam uji t adalah sebagai berikut:

a) Menentukan Hipotesis

b) Tingkat signifikansi

Menentukan tingkat signifikansi dengan menggunakan 5% ($\alpha = 0.05$).

c) Menentukan t_{hitung} dengan rumus:

$$t_{\text{hitung}} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

⁵⁴Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kaulitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 154.

Keterangan:

r = Nilai koefisien korelasi

n = Jumlah sampel

d) Menentukan t_{tabel} (diambil dari hasil tabel distribusi t pada $\alpha = 5\%$). Rumus $t_{\text{tabel}} = n - k$.

e) Membuat kesimpulan:

(1) Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, menyatakan bahwa variabel independen (x) mempengaruhi variabel dependen (y).

(2) Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, menyatakan bahwa variabel independen (x) tidak mempengaruhi variabel dependen (y).

2) Analisis Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Untuk menguji apakah variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan perubahan nilai variabel tergantung atau tidaknya. Adapun langkah-langkah uji F adalah sebagai berikut:⁵⁵

a) Menentukan Hipotesis

(1) $H_4 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$,

(2) $H_0 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$,

⁵⁵ Ridwan dan Sunarto, Pengantar Statistika Untuk Peneitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis (Bandung:Alfabeta, 2014),8

b) Tingkat signifikansi

Menentukan tingkat signifikansi dengan menggunakan $\alpha = 5\%$ ($\alpha = 0.05$).

c) Menentukan F_{hitung} dengan rumus:

$$F_{hitung} = \frac{\frac{R^2}{k}}{\frac{(1-R^2)}{n-k-1}}$$

Keterangan:

R : Nilai korelasi ganda n : Jumlah sampel

k : Jumlah variabel bebas (independen)

d) Menentukan F_{tabel} dengan pada $\alpha = 5\%$ dengan tingkat keyakinan 95%.

e) Membuat kesimpulan

(1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_4 diterima, menyatakan bahwa masing-masing variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

(2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_4 ditolak, menyatakan bahwa masing variabel independen secara simultan tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

3) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pada regresi berganda, koefisien dari determinasi berganda mempresentasikan proporsi dari variasi y yang dijelaskan oleh

seperangkat variabel independen.⁵⁶ Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara 0 sampai 1 atau $0 \leq R^2 \leq 1$, yang berarti variasi dari variabel bebas semakin dapat menjelaskan variabel dari variabel tidak bebas bila angkanya semakin mendekati 1. Jadi untuk menentukan nilai koefisien determinasi dinyatakan dengan *R square*. Adapun rumus koefisien determinasi adalah:

$$R^2 = (r)^2 \times 100\%$$

Dimana: R^2 : koefisien determinasi

r: koefisien korelasi

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini merujuk pada buku pedoman penulisan karya ilmiah Istitusi Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis akan menguraikan secara singkat untuk memberikan gambaran secara keseluruhan isis penulisan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan peneltian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka konseptual, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

⁵⁶ Sujoko Efferin dkk, *Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), 217.

Bab II Penyajian Data dan Analisis. Bab ini berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat kajian teori.

Bab III Penyajian Data dan Analisis. Hasil penelitian yang berisi tentang inti atau hasil penelitian yang meliputi gambaran obyek penelitian, penyajian data, analisis dan pengujian hipotesis, serta pembahasan.

Bab IV Penutup. Bab ini berisi kesimpulan penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari peneliti.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu. Dengan adanya melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.⁵⁷ Ada beberapa hasil penelitian yang penulis anggap mempunyai relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain sebagai berikut:

1. Vivi Adeyani (2016). Dalam *Asian Journal of Accounting Research* Volume 1 Issue 1. Dengan judul “ The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance : An Empirical Study on Manufacturing in IDX period 2010-2013”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bukti empiris tentang pengaruh good corporate governance terhadap penghindaran pajak yang menjadi proksi dari Effective Tax rate (ETR). Sampel penelitian ini menggunakan 120 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak secara parsial tetapi kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, proporsi dewan

⁵⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah IAIN* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 64.

komisaris, komite audit dan kualitas audit secara simultan berpengaruh dalam mendefinisikan penghindaran pajak.⁵⁸

2. Dina Marfirah dan Syam Fazli Bz (2016). Dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Universitas Syiah Kuala. Dengan judul “Pengaruh *Corporate Governance* dan Leverage terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2015”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, dewan direksi, kualitas audit, komite audit, dan leverage terhadap penghindaran pajak. Sample dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Analisis penelitian menggunakan regresi linier berganda dengan SPSS 20.0. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak (2) pengaruh komisaris terhadap penghindaran pajak (3) pengaruh pajak terhadap pemeriksaan quality avoidance (4) pengaruh komite audit terhadap tax avoidance (5) leverage effect terhadap tax avoidance.⁵⁹
3. Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2016). Dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran. Dengan judul “ Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas Terhadap

⁵⁸ Tandean, Vivi Adeyani and Winnie. 2016. “The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX Period 2010-2013”. Institute Bussiness and Informatics Kwik Kian Gie Volume 1.

⁵⁹ Dina Marfirah, Fazli Syam BZ, 2016, Pengaruh Corporate Governance dan leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi.

Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Listing Bursa Efek Indonesia periode Tahun 2011-2013”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dan untuk menganalisis jumlah komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dapat mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang go public listing di Bursa Efek Indonesia. Menggunakan data sekunder dengan jumlah sampel 23 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. Analisis penelitian menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian sebagai berikut: (1) dari uji keenam variabel independen, variabel dengan pengaruh signifikan pada penghindaran pajak adalah kepemilikan institusional. (2) dari lima variabel yang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak adalah komite audit, dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas.⁶⁰

4. Yoli Oktafiani Sari (2016). Dalam e-Skripsi, Universitas Andalas dengan judul “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak dan diproksikan dengan kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit dan

⁶⁰ Cahyono, Dyas. Deddy., Rita Andini, dan Kharis Raharjo. (2016). “Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) Dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011 – 2013.” *Journal Of Accounting* 2(2).

komite audit terhadap penghindaran pajak. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014 dengan menggunakan metode purposive sampling sebagai teknik penarikan sample dan penelitian ini menggunakan analisis regresi linear. Dari hasil penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kualitas audit secara statistik mempunyai hubungan dengan penghindaran pajak dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.⁶¹

5. Nindy Meiza Utari (2016). Dalam e-Skripsi Universitas Andalas dengan judul “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Upaya Penghindaran Pajak Perusahaan”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate governance terhadap penghindaran pajak perusahaan dan diprosikan dengan kompensasi eksekutif, komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan tahunan industri properti, real estate dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia pada periode 2010-2014, penelitian ini juga mengambil sample dengan menggunakan metode purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak,

⁶¹ Oktafiani Sari, Yoli (2016). “ Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak”. Universitas Andalas. Padang.

sedangkan kompensasi eksekutif dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara, secara bersamaan kompensasi eksekutif, komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.⁶²

6. Hidayana (2017). Dalam Jurnal Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Bandar Lampung dengan judul “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi eksekutif, latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit, dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Sample penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan uji t, uji f, dan uji koefisien determinasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif dan latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.⁶³

⁶² Nindy, Meiza Utari (2016). “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Upaya Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Industri Properti, Real Estate dan Kontruksi Bangunan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014”. Diploma thesis, Universitas Andalas.

⁶³ Hidayana. 2017. “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2013-2015”, Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Bandar Lampung.

7. Tati Yulia Okrayanti, Supri Wahyudi Utomo, Elva Nuraina (2017). Dalam Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi Vol 5, No 1 (2017). Dengan judul “Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan *Corporate Governance* Terhadap Tax avoidance (Studi pada perusahaan Manufaktur di BEI) ”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik perusahaan dan corporate governance terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan sampel akhir sebanyak 100 perusahaan. Teknik data yang digunakan adalah statistic deskriptif, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan program IBM SPSS statistic versi 21. Hasil dari penelitian secara parsial menunjukkan bahwa leverage, intensitas modal, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan hasil secara simultan menunjukkan ukuran perusahaan leverage, intensitas modal, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance.⁶⁴
8. Natrion (2017). Dalam Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Satya Negara Indonesia. Dengan judul “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap

⁶⁴ Okrayanti, Tati Yuliana, Supri Wahyudi Utomo, dan Elva Nuraina. 2017. Pengaruh Karakteristik perusahaan dan corporate governance terhadap tax avoidance (studi pada perusahaan manufaktur di BEI). e-ISSN : 2337- 9723 The 9th FIPA: Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun.

⁶⁵ Natrion. 2017. Pengaruh Corporate Manajemen Terhadap Manajemen Pajak. *Prosiding Seminat Nasional Inovasi telmologi-SNTTek 2017*, ISSN 2580-5495.

Manajemen Pajak”. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh tata kelola perusahaan terhadap perilaku manajemen pajak. Sample penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan 30 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sample penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris, presentase komisaris independen, dan kompensasi serta dewan direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.⁶⁵

9. Winda Fitria Ningsih dan Titik Mildawati (2017). Dalam jurnal Simposium Nasional Akuntansi XX, Jember. Dengan judul “ Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan”. Teknik pengumpulan sampel dengan menggunakan purposive sampling dan instrument analisis data yang telah diterapkan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji corporate governance terhadap penghindaran pajak perusahaan dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Mekanisme tata kelola perusahaan dalam penelitian ini meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan public, dewan komisaris dan latar belakang keterampilan akuntansi atau kimate audit keuangan.⁶⁶
10. Robiatus Salamah (2018). Dalam Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak

⁶⁵ Ningsih, Fitria Winda dan Mildawati, Titik. “*Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan*”. Simposium Nasional Akuntansi XX, Jember, 2017.

Perusahaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar di LQ45”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap penghindaran pajak, dimana *Good Corporate Governance* meliputi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang terdapat di website LQ45. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan data yang dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dan diolah dengan menggunakan SPSS 20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Hasil pengujian hipotesis model regresi secara simultan terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel independen yaitu Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial terhadap variabel dependen. (2) hasil pengujian secara parsial antara dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh negative dan signifikan terhadap penghindaran pajak.⁶⁷

⁶⁷ Salamah, Robiatus. 2018. “Pengaruh Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan

No	Nama peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Vivi Adeyani (2016). Institute Bussines and Informatics Kwik Kian Gie.	The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance : An Empirical Study on Manufacturing in IDX period 2010-2013.	<ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis: Regresi linier berganda. • Jenis penelitian: Kuantitatif. • Sumber data: Data sekunder. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sampel: 120 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013. • Variabel lain: Kompensasi Eksekutif, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, dan Kualitas Audit
2.	Dina Marfirah dan Syam Fazli Bz (2016). Universitas Syiah Kuala.	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan Leverage terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2015.	<ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis: Regresi linier berganda. • Jenis penelitian: Kuantitatif. • Sumber data: Data skunder. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sampel: 132 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. • Variabel lain: Quality Avoidance dan leverage
3.	Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2016). Universitas Pandanaran.	Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Listing Bursa Efek Indonesia periode Tahun 2011-2013.	<ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis: Regresi linier berganda. • Jenis penelitian: Kuantitatif. • Sumber data: Data sekunder 	<ul style="list-style-type: none"> • Sampel: 23 Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia • Variabel lain: Ukuran Perusahaan, leverage dan Profitabilitas.
4.	Yoli, Oktafiani Sari (2016). Universitas Andalas.	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitian: Kuantitatif. • Sumber data : Data sekunder. • Metode analisis: 	<ul style="list-style-type: none"> • Sampel: Seluruh Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

			Regresi linier berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel lain: Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Kualitas Audit.
5.	Nindy, Meiza Utari (2016). Universitas Andalas.	Pengaruh Corporate Governance Terhadap Upaya Penghindaran Pajak Perusahaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis: Regresi linier berganda. • Jenis penelitian: Kuantitatif. • Sumber data: Data sekunder. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sampel: 21 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. • Variabel lain: Kompensasi Eksekutif.
6.	Hidayana (2017). Universitas Lampung Bandar Lampung.	Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015.	<ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis: Regresi linier berganda. • Jenis penelitian: Kuantitatif. • Sumber data: Data sekunder. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sampel: Sebanyak 137 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. • Variabel lain: Kompensasi Eksekutif, Keuanagn Komite audit.
7.	Tati Yulia Okrayanti, Supri Wahyudi Utomo, Elva Nuraina (2017). Universitas PGRI Madiun.	Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Tax avoidance (Studi pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia).	<ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis: Regresi linier berganda. • Jenis penelitian: Kuantitatif. • Sumber data: Data sekunder. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sampel: Sebanyak 100 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. • Variabel lain: Leverage dan Intensitas Modal.
8.	Natrion (2017). Universitas Satya Negara Indonesia.	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Pajak.	<ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis: Regresi linier berganda. • Jenis penelitian: Kuantitatif. • Sumber data: Data sekunder. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sampel: 30 perusahaan yang terdaftar di BEI. • Variabel lain: Kompensasi dan Manajemen Pajak.
9.	Winda Fitria Ningsih dan Titik Mildawati (2017). Universitas	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Penghindaran Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis: Regresi linier berganda. • Jenis penelitian: 	<ul style="list-style-type: none"> • Sampel: 48 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

	Jember.	Perusahaan.	Kuantitatif.	• Variabel lain:
			<ul style="list-style-type: none"> • Sumber data: Data sekunder 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh kepemilikan manajerial, institusional, komite audit, komisaris independen dan <i>tax avoidance</i>..
10.	Robiatus Salamah (2018). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar di LQ45.	<ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis: Regresi linier berganda. • Jenis penelitian: Kuantitatif. • Sumber data: Data sekunder. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sampel: Sebanyak 45 perusahaan yang terdaftar di BEI. • Variabel lain: Pengaruh kepemilikan manajerial, institusional, komisaris independen terhadap Tax Avoidance.

Sumber: Data diolah

B. Kajian Teori

1. *Corporate Governance*

a. Pengertian *Corporate Governance*

Corporate governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham.⁶⁸ IFC mendefinisikan *corporate governance* sebagai sebuah struktur dan proses dalam menentukan arah dan pengawasan terhadap perusahaan.

Menurut *Organization for Economic and Development* menyatakan

⁶⁸ Muhammad Nasrum Akal dan Andi Tenri Uleng Akal, *Corporate Governance* (Konsep, teori dan aplikasi di beberapa Negara Asia). Pustaka Salewanagan Maros, 2015. Hal 4.

⁶⁹ Muhammad Nasrum Akal dan Andi Tenri Uleng Akal, *Corporate Governance* (Konsep, teori dan aplikasi di beberapa Negara Asia). Pustaka Salewanagan Maros, 2015. Hal 8.

corporate governance sebagai sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan.

Corporate governance merupakan sebuah studi yang mempelajari hubungan direktur, manajer, karyawan, pemegang saham, pelanggan, kreditur dan pemasok terhadap perusahaan dan hubungan antara sesamanya.⁶⁹ Kehadiran *corporate governance* yang baik bagi suatu perusahaan akan menunjang aktivitas operasional perusahaan. Selain itu mekanisme pelaksanaan *corporate governance* suatu perusahaan harus menjadi perhatian utama perusahaan demi kelancaran kegiatan dalam perusahaan. Mekanisme *corporate governance* yang baik memiliki keterkaitan dengan kemakmuran perusahaan dan para pemegang saham, sehingga penerapannya diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perusahaan secara keseluruhan.

Good corporate governance (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Penerapan *good corporate governance* mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif.⁷⁰

Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Good corporate governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stockholder.⁷⁰ Secara umum *good corporate governance* merupakan sebagai sistem hukum dan praktik untuk menjelaskan kewenangan dan control dalam kegiatan bisnis perusahaan. Penerapan *good corporate governance* perlu adanya dukungan dari tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu Negara dan perangkat sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.

Awalmula munculnya konsep *good corporate governance* di Indonesia diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) dalam rangka *economy recovery* pasca krisis, *good corporate governance* merupakan suatu konsep tentang tata cara kelola perusahaan yang sehat dan diharapkan dapat melindungi pemegang saham dan kreditur agar dapat memperoleh kembalinya investasinya. Tuntutan atas adanya penerapan *good corporate governance* juga merupakan salah satu isu menarik masuknya pemodal asing ke dalam pasar modal suatu negara. Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG (2006) menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa pada setiap aspek bisnis harus

⁷⁰ Sulistyanto, H. S., dan R. Lidyah. (2002). *Good Governance: Antara Idealisme dan Kenyataan*. Modus, 14 (1), Februari, hal. 19-30.

⁷¹ Desai, Mihir, dan D. Dharmapala. *Corporate Tax Avoidance and Firm Value*. Economics and Statistics. August 2009, Pages 537-546.

memastikan bahwa prinsip-prinsip pokok *good corporate governance* di semua jajaran perusahaan.

b. Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan *Good Corporate Governance*.⁷² Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berdasarkan keputusan menteri (KEPEMEN) Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP – 117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada BUMN meliputi:

1) *Transparency* (Transparan)

Transparansi adalah pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.⁷³ Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi yang secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dimonitor.⁷⁴ Transparansi dalam hal ini berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan oleh perusahaan.

⁷² Zabihollah Rezaee, *Financial Statement Fraud: Prevention and Detection*. Wiley Products. 2002.

⁷³ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, 224.

⁷⁴ Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, 19.

⁷⁵ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, 17-18.

⁷⁶ Muhammad Nasrum Akal dan Andi Tenri Uleng Akal, *Corporate Governance (Konsep, teori dan aplikasi di beberapa Negara Asia)*. Pustaka Salewanagan Maros, 2015, hal 30.

Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.⁷⁵ Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, tepat waktu, serta dapat dibandingkan dengan indikator-indikator lain yang sama. Penyampaian informasi kepada publik secara terbuka, benar, kredibel dan tepat waktu akan memudahkan untuk menilai kinerja dan resiko yang dihadapi perusahaan.

2) *Fairness* (Kewajaran)

Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁶ Perinsip ini menekankan pada jaminan perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing serta perlakuan yang setara terhadap semua investor. Dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan harus senantiasa memperhatikan pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan.⁷⁷

Praktek kewajaran ini juga mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi

⁷⁷ Muhammad Nasrum Akal dan Andi Tenri Uleng Akal, *Corporate Governance* (Konsep, teori dan aplikasi di beberapa Negara Asia). Pustaka Salewanagan Maros, 2015, hal 30.

⁷⁸ Waluyo, *Manajemen Publik*, 195

semua pihak. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas dari praktek kecurangan dan praktek-praktek *insider trading*. Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan akan melarang praktek-praktek tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain.

3) *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum, pimpinan atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.⁷⁸

Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.⁷⁹

Prinsip ini memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi beserta kewajiban-

⁷⁹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 20.

⁸⁰ Muhammad Nasrum Akal dan Andi Tenri Uleng Akal, *Corporate Governance (Konsep, teori dan aplikasi di beberapa Negara Asia)*. Pustaka Salewanagan Maros, 2015. Hal 29.

kewajibannya kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya. Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi masalah keagenan yang timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris.

4) *Responsibility* (Pertanggung-jawaban)

Responsibilitas adalah tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugasnya yang berhubungan dengan peran seseorang kepada pihak yang dilayani. Responsibilitas menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.⁸⁰

Prinsip ini menekankan pada adanya system yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai dalam good corporate governance yaitu mengakomodasikan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintan, asosiasi bisnis dan sebagainya.⁸¹

5) *Independency* (Independensi)

Independensi adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan

⁸¹ Muhammad Nasrum Akal dan Andi Tenri Uleng Akal, Corporate Governance (Konsep, teori dan aplikasi di beberapa Negara Asia). Pustaka Salewanagan Maros, 2015. Hal 29.

⁸² Muhammad Nasrum Akal dan Andi Tenri Uleng Akal, Corporate Governance (Konsep, teori dan aplikasi di beberapa Negara Asia). Pustaka Salewanagan Maros, 2015. Hal 31.

pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.⁸² Independensi juga merupakan keadaan atau posisi dimana kita tidak terikat dengan pihak manapun. Artinya keberadaan kita adalah mandiri, tidak mengusung kepentingan pihak tertentu atau organisasi tertentu.

Prinsip ini menuntut bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan. Pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholders yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan.⁸³ Implementasi prinsip-prinsip *good*

corporate governance dalam *corporate governance*

mencerminkan bahwa perusahaan tersebut telah dikelola dengan baik dan transparan. Hal tersebut merupakan modal dasar bagi timbulnya kepercayaan publik sehingga perusahaan yang telah *go public* saham perusahaannya akan lebih diminati oleh para investor dan berdampak positif terhadap peningkatan nilai perusahaan atau harga saham.

c. Mekanisme *Good Corporate Governance*

Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil

⁸³ Muhammad Nasrum Akal dan Andi Tenri Uleng Akal, *Corporate Governance* (Konsep, teori dan aplikasi di beberapa Negara Asia). Pustaka Salewanagan Maros, 2015. Hal 31.

⁸⁴ Muhammad Nasrum Akal dan Andi Tenri Uleng Akal, *Corporate Governance* (Konsep, teori dan aplikasi di beberapa Negara Asia). Pustaka Salewanagan Maros, 2015. Hal 55.

keputusan dengan pihak yang melakukan control, pengawasan terhadap keputusan tersebut.⁸⁴ Mekanisme *good corporate governance* dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain. Institusi sebagai pemilik saham dianggap lebih mampu dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi. Dengan demikian, akan semakin membatasi manajemen dalam memainkan angka-angka dalam laporan keuangan.⁸⁵ Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen.

Karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung terhadap kinerja manajemen.

Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Semakin besar kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali, maka hal tersebut akan meningkatkan kualitas *good corporate governanc*.⁸⁶ Kepemilikan institusional juga memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang

⁸⁵ Muhammad Nasrum Akal dan Andi Tenri Uleng Akal, *Corporate Governance (Konsep, teori dan aplikasi di beberapa Negara Asia)*. Pustaka Salewanagan Maros, 2015. Hal 73.

⁸⁶ Muhammad Nasrum Akal dan Andi Tenri Uleng Akal, *Corporate Governance (Konsep, teori dan aplikasi di beberapa Negara Asia)*. Pustaka Salewanagan Maros, 2015. Hal 73.

intens. Kepemilikan institusional dapat menekan kecendrungan manajemen untuk memanfaatkan *discretionary* dalam laporan keuangan melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba.

2) Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris memiliki peran yang penting dalam tata kelola perusahaan yang baik, dan tugas utama dewan komisaris adalah mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut oleh direksi dalam menjalankan perusahaan dan memberi nasehat pada direksi.⁸⁷ Komisaris independen sendiri didefinisikan sebagai seseorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham terkendali. Komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan.⁸⁸

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, komisaris independen adalah anggota komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai hubungan afiliasi dan tidak mempunyai hubungan usaha langsung maupun tidak langsung dengan emiten atau perusahaan publik.⁸⁹ Berdasarkan peraturan

⁸⁷ Muhammad Nasrum Akal dan Andi Tenri Uleng Akal, *Corporate Governance (Konsep, teori dan aplikasi di beberapa Negara Asia)*. Pustaka Salewanagan Maros, 2015. Hal 66.

⁸⁸ Muhammad Nasrum Akal dan Andi Tenri Uleng Akal, *Corporate Governance (Konsep, teori dan aplikasi di beberapa Negara Asia)*. Pustaka Salewanagan Maros, 2015. Hal 68.

⁸⁹ Muhammad Nasrum Akal dan Andi Tenri Uleng Akal, *Corporate Governance (Konsep, teori dan aplikasi di beberapa Negara Asia)*. Pustaka Salewanagan Maros, 2015. Hal 69.

Otorisasi Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris minimal terdiri dari 2 (dua orang) dan 1 (satu) diantaranya merupakan komisaris independen. Apabila terdiri dari 2 (dua) orang dewan komisaris, jumlah komisaris independen minimal harus 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

3) Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial (*managerial ownership*) merupakan kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan.⁹⁰ Besarnya kepemilikan manajerial diukur dari jumlah presentase saham yang dimiliki manajer dalam perusahaan. Kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer dengan pemegang saham. Sehingga permasalahan keagenan dapat diasumsikan akan hilang apabila seseorang manajer dianggap sebagai seorang pemilik.⁹¹

Semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka semakin baik kinerja perusahaan. Dengan demikian dalam memutuskan keputusan manajer akan lebih berhati-hati dan berupaya menghasilkan keputusan yang terbaik bagi kelangsungan

⁹⁰ Muhammad Nasrum Akal dan Andi Tenri Uleng Akal, *Corporate Governance (Konsep, teori dan aplikasi di beberapa Negara Asia)*. Pustaka Salewanagan Maros, 2015. Hal 74.

⁹¹ Muhammad Nasrum Akal dan Andi Tenri Uleng Akal, *Corporate Governance (Konsep, teori dan aplikasi di beberapa Negara Asia)*. Pustaka Salewanagan Maros, 2015. Hal 75.

hidup perusahaan karena secara langsung manajemen akan ikut merasakan setiap keputusan yang akan diambil.

4) Komite Audit

Komite audit sesuai dengan Kep. 29/PM/2004 adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Menurut BAPEPAM-LK Nomor IX.I.5 yang dimaksud dengan komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Diantaranya membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat profesional yang independen untuk meningkatkan kualitas kerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan.

Komite audit merupakan pihak yang bertugas untuk membantu komisaris dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan efektifitas audit internal dan eksternal.⁹² Keberadaan komite audit bermanfaat untuk menjamin transparansi, keterbukaan laporan keuangan, keadilan untuk semua *stakeholders*, dan pengungkapan semua informasi telah dilakukan oleh manajemen meski ada konflik kepentingan.⁹³ Komite audit merupakan suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota komisaris dan keberadaannya terbebas dari pengaruh

⁹² Muhammad Nasrum Akal dan Andi Tenri Uleng Akal, *Corporate Governance (Konsep, teori dan aplikasi di beberapa Negara Asia)*. Pustaka Salewanagan Maros, 2015. Hal 71.

⁹³ Muhammad Nasrum Akal dan Andi Tenri Uleng Akal, *Corporate Governance (Konsep, teori dan aplikasi di beberapa Negara Asia)*. Pustaka Salewanagan Maros, 2015. Hal 71.

direksi, eksternal auditor dan hanya bertanggung jawab kepada dewan komisaris.⁹⁴

Dalam surat edaran dari Direksi PT Bursa Efek Indonesia SE 008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 perihal keanggotaan komite audit, disebutkan bahwa:

- a) Jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, termasuk komite audit.
- b) Anggota komite audit yang berasal dari komisaris hanya sebanyak 1 (satu) orang.
- c) Anggota lainnya dari komite audit adalah berasal dari pihak eksternal yang independen.

Pada umumnya komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:⁹⁵

- a) Laporan keuangan.
- b) Tata kelola perusahaan.
- c) Pengawasan perusahaan.
- d. Manfaat *Corporate Governance*

Manfaat penerapan *corporate governance* menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia*, adalah:⁹⁶

⁹⁴ Muhammad Nasrum Akal dan Andi Tenri Uleng Akal, *Corporate Governance* (Konsep, teori dan aplikasi di beberapa Negara Asia). Pustaka Salewanagan Maros, 2015. Hal 72

⁹⁵ Muhammad Nasrum Akal dan Andi Tenri Uleng Akal, *Corporate Governance* (Konsep, teori dan aplikasi di beberapa Negara Asia). Pustaka Salewanagan Maros, 2015. Hal 72.

⁹⁶ Muhammad Nasrum Akal dan Andi Tenri Uleng Akal, *Corporate Governance* (Konsep, teori dan aplikasi di beberapa Negara Asia). Pustaka Salewanagan Maros, 2015. Hal 76.

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan *corporate value*.
- 3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modelnya di Indonesia.
- 4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder value* dan *dividen*.

2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁹⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

⁹⁷ Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Terbaru 2016 (Yogyakarta : Penerbit ANDI, 2016),3.

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak juga merupakan salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanah air dan negara. Akan tetapi, tidak semua wajib pajak mau melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan yang seharusnya. Ketidak patuhan terhadap pajak merupakan sebuah tindakan yang tidak mematuhi hukum dan peraturan perpajakan sebuah negara dengan tidak membayar pajak atau tidak melaporkan jumlah pendapatan yang sesungguhnya, yang mana dapat mencakup menghindari pajak dalam cara yang legal.⁹⁸

Penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak memanfaatkan celah hukum dengan tujuan memperkecil pajak yang harus dibayar. Celah hukum yang dimanfaatkan wajib pajak dapat terjadi akibat ketiadaan aturan yang jelas mengenai suatu skema atau transaksi. Suatu tindakan wajib pajak dapat dikatakan sebagai penghindaran pajak bila motif dari suatu transaksi atau skema yang dibuat wajib pajak tidak memiliki substansi bisnis atau alasan personal.⁹⁹ Aktivitas penghindaran pajak merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus diabayar dengan memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam hukum perpajakan, sehingga tetap dalam koridor hukum.

⁹⁸ Aumeerun, B., B. Jugurnath, dan H. Soondrum. 2016. Tax Evasion: Empirical Evidence from sub-Saharan Africa. *Journal of Accounting and Taxation*, 8(7).

⁹⁹ Tooma Rachel Anne, *Legislating Against Tax Avoidance* (Amsterdam: IBFD, 2008), 12-13.

Praktik penghindran pajak didukung dengan berkembangnya teknologi informasi serta semakin terbentuknya prekonomian suatu negara memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya salah satunya dengan mengembangkan usahanya sampai ke luar negeri di tengah persaingan prekonomian di dunia yang semakin ketat.¹⁰⁰

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak:

- a. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- b. Memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- c. Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

Ada beberapa faktor yang memotifasi wajib pajak untuk melakukan peghematan pajak dengan ilegal, antara lain:

- a. Jumlah pajak yang harus dibayar.
- b. Biaya untuk menyuap fiskus.
- c. Kemungkinan untuk terdeteksi semakin kecil.
- d. Besar sanksi.

¹⁰⁰ Mohammad Zain. "Manajemen Perbankan". Jakarta: Salemba Empat. 2003.

Terdapat dua potensi untuk bertahan terhadap pembayaran pajak, yaitu:

- a. Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.
- b. Wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak yaitu berusaha menghindarkan pajak terutang secara ilegal.

Pada intinya penghindaran pajak merupakan usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku dengan cara menggunakan alternatif-alternatif yang rill yang dapat diterima oleh fiskus sehingga cara tersebut tidak melanggar undang-undang dan dapat dianggap ilegal. Dengan melakukan tindakan penghindaran pajak maka perusahaan berharap dapat menaikkan laba yang diperoleh dan meminimalkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.

IAIN JEMBER

BAB III

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan populasi berupa perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) di tahun 2016-2019. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*. Penulis menggunakan data selama empat tahun dari tahun 2016-2019 untuk menggambarkan profil dan data keuangan perusahaan tersebut. Fokus penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh variabel independen (Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial dan Komite Audit) terhadap variabel dependen (Penghindaran Pajak) pada perusahaan perbankan.

Jumlah perusahaan perbankan yang diteliti sebanyak 25 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan total data 100 laporan keuangan perusahaan. Data diperoleh melalui website www.idx.co.id dan website perusahaan.

B. Penyajian Data

Untuk memperoleh data mengenai pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris, kepemilikan manajemen dan komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan, sampel peneliti menggunakan 25 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia. Berikut sampel kriteria perusahaan perbankan yang telah di tetapkan:

Tabel 3.1
Pengambilan Sampel dengan *Purposive Sampling*

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2019	25
2.	Perusahaan yang mengalami <i>delisting</i> selama periode 2016-2019	(0)
3.	Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan selama tahun 2016-2019	(0)
4.	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan yang dinyatakan dalam rupiah dan berakhir pada tanggal 31 desember selama periode pengamatan tahun 2016-2019	(0)
5.	Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data variabel-variabel yang digunakan.	(0)
	Jumlah perusahaan yang digunakan	25
	Total keseluruhan sampel selama 4 tahun (25x4)	100

Sumber: data sekunder yang diperoleh

Jumlah perusahaan perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2019 berjumlah 25 perusahaan perbankan, perusahaan perbankan tersebut tidak ada yang mengalami *delisting*, tidak ada perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan selama 2016-2019, dan tidak ada perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan selain mata uang rupiah dan tidak terdaftar perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data terikat variabel yang digunakan. Sehingga perusahaan perbankan yang dijadikan sampel perusahaan yang digunakan sebanyak 25 perusahaan. Sedangkan total data yang dijadikan sampel

penelitian ini sebanyak 100 sampel. Adapun perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.2
Daftar Nama Perusahaan

No.	PERUSAHAAN	KODE
1.	Bank Artha Graha Internasional Tbk.	INPC
2.	Bank Central Asia Tbk.	BBCA
3.	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	BBNI
4.	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	BBRI
5.	Bank Cimb Niaga Tbk.	BNGA
6.	Bank Danamon Indonesia Tbk.	BDMN
7.	Bank Maybank Indonesia Tbk.	BNII
8.	Bank Mandiri Tbk.	BMRI
9.	Bank Permata Tbk.	BNLI
10.	Bank Mega Tbk.	MEGA
11.	Bank Harda Internasional Tbk.	BBHI
12.	Bank Mayapada Internasional Tbk.	MAYA
13.	Bank Pan Indonesia Tbk.	PNBN
14.	Bank Bukopin Tbk.	BBKP
15.	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	BBTN
16.	Bank Tabungan Pensiunan National Tbk.	BTPN
17.	Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.	MCOR
18.	Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.	SDRA
19.	Bank Sinarmas Tbk.	BSIM
20.	Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.	AGRO
21.	Bank IBK Indonesia Tbk	AGRS
22.	Bank Yudha Bhakti Tbk.	BBYB
23.	Bank MNC Internasional Tbk.	BABP
24.	Bank Ina Perdana Tbk.	BINA
25.	Bank Mestika Dharma Tbk.	BBMD

Sumber: data diolah

C. Analisis dan Pengujian Hipotesis

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskriptif suatu data yang dilihat dari rata-rata (*mean*), deviasi standar (*standard deviation*), dan maksimum minimum. *Mean* digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata populasi yang diperkirakan dari sampel. Deviasi standar digunakan untuk menilai disperse rata-rata dari sampel. Sedangkan maksimum-minimum digunakan untuk melihat nilai maksimum dan minimum dari populasi. Berikut hasil uji statistik deskriptif menggunakan program SPSS:

Tabel 3.3
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan Institusional	100	0,5782	1,0000	0,899661	0,0977034
Komisaris Independen	100	0,0000	0,0479	0,002821	0,0102609
Kepemilikan Manajerial	100	0,0000	0,0117	0,000390	0,0016409
Komite Audit	100	0,2	0,8	0,448	0,1382
Tax Avoidance	100	0,02	0,92	0,2685	0,11491
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Pada tabel di atas, disajikan deskriptif statistik variabel penelitian meliputi nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (mean) dan standart deviasi. Pada variabel Penghindaran Pajak (Y) diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,2685 dengan standart deviasi sebesar 0,11491. Nilai minimum variabel ini sebesar 0,02 dan nilai maksimum sebesar 0,92. Pada variabel Kepemilikan Institusional (X1) diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,899661 dengan standar deviasi sebesar 0,0977034. Nilai minimum variabel ini

sebesar 0,5782 dan nilai maksimum sebesar 1. Pada variabel Komisaris Independen (X2) diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,002821 dengan standart deviasi sebesar 0,0102609. Nilai minimum variabel ini sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 0,0479. Pada variabel Kepemilikan Manajerial (X3) diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,000390 dengan standart deviasi sebesar 0,0016409. Nilai minimum variabel ini sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 0,0117. Pada variabel Komite Audit (X4) diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,448 dengan standart deviasi sebesar 0,1382. Nilai minimum variabel ini sebesar 0,2 dan nilai maksimum sebesar 0,8.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

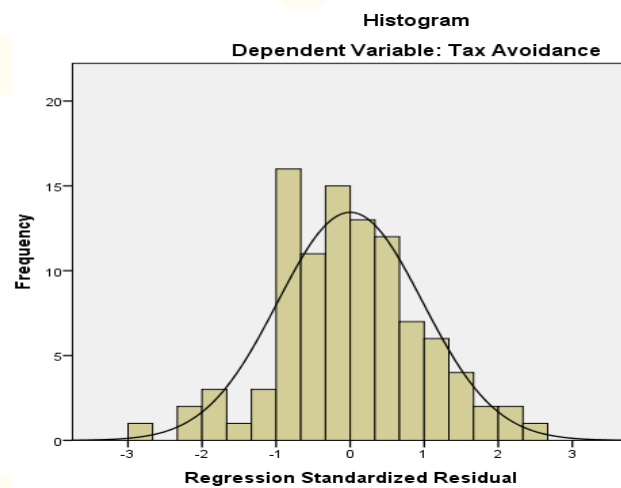
Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka model tersebut memenuhi asumsi normalitas.¹⁰¹

Grafik tersebut menggunakan *normal robability plot* dan grafik histogram serta uji kolmogoroc-smimov dengan membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal digambarkan dengan sebuah

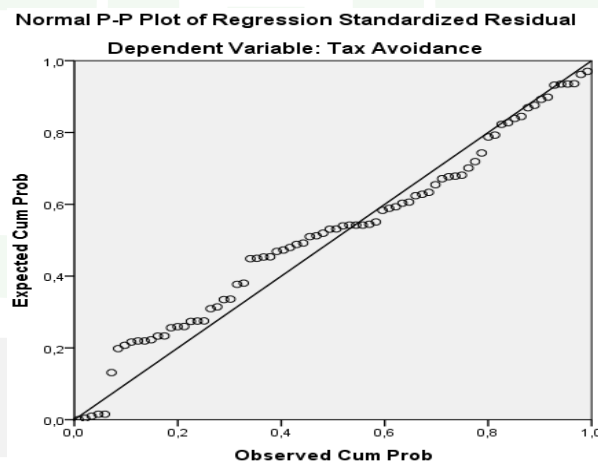
¹⁰¹ Husein Umar, *Desain Penelitian MSDM*, 77.

garis diagonal lurus dari kiri bawah kekanan atas.¹⁰² Hasil uji normalitas data menggunakan bantuan *SPSS Statistics* versi 22 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1
Uji Normalitas



Gambar 3.2
Uji Normalitas



¹⁰² Suliyanto, *Ekonometrika Terapan*, 69.

Tabel 3.4
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,05277760
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,082
	Positive	,056
	Negative	-,082
Test Statistic		,082
Asymp. Sig. (2-tailed)		,098 ^c

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Dari gambar grafik diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal (mengikuti wilayah garis linier) dan pada grafik histogram grafik mengikuti garis normal. Hal ini menunjukkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi secara normal dan model regresi tersebut layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan masukan variabel independen. Sedangkan berdasarkan uji *Kolmogorov-Smirnov* dapat diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai *Asymp, sig, > 0,05*, ini mengartikan bahwa semua data terdistribusi dengan normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas atau tidak. Salah satu cara untuk menguji gejala multikolinieritas dalam model regresi adalah dengan melihat nilai *Tolerance (TOL)* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* dari

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai VIF tidak lebih dari 10, maka model dinyatakan tidak mengandung multikolinieritas.¹⁰³ Adapun hasil pengujian multikolinieritas dengan menggunakan *SPSS Statistics* versi 22 pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1			
	Kep Institusional	,986	1,014
	Kom Independen	,940	1,064
	Kep Manajerial	,952	1,051
	Kom Audit	,994	1,006

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa uji multikolinieritas model regresi tidak terjadi korelasi antar variabel bebas, karena dapat dilihat dari nilai *Tolerance* pada masing-masing variabel bebas atau independen lebih besar dari 0,10. Sedangkan perhitungan VIF menunjukkan bahwa nilai VIF pada masing-masing variabel bebas kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi.

¹⁰³ Ibid, 96.

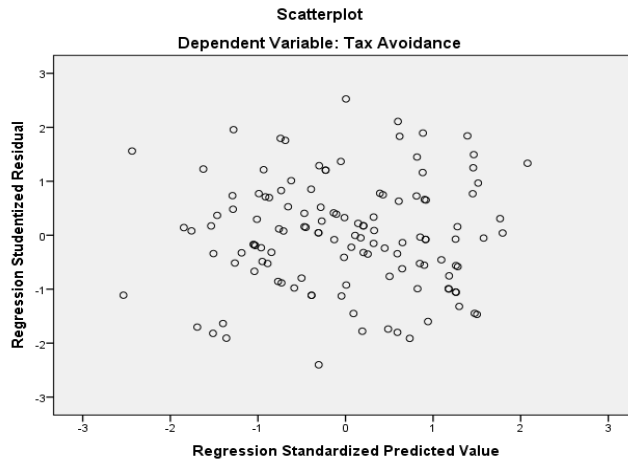
c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi.¹⁰⁴ Uji heteroskedastisitas menggunakan metode analisis grafik dilakukan dengan mengamati *scatterplot* dimana sumbu horizontal menggambarkan nilai *predicated standardized*. Jika *scatterplot* membentuk pola tertentu, hal itu menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk. Sebaliknya jika *scatterplot* menyebar secara acak maka hal itu menunjukkan tidak ada masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk. *Scatterplot* dapat diamati dimana variabel bebas sebagai sumbu horizontal dan nilai residual kuadratnya sebagai sumbu vertikal.¹⁰⁵ Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas dengan bantuan *SPSS Statistics* versi 22.

¹⁰⁴ Zahriah, *Diktat Pengajaran Aplikasi*, 78.

¹⁰⁵ Suliyanto, *Ekonomi Terapan*, 95

Gambar 3.3
Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data diolah SPSS (Terlampir)

Berdasarkan grafik *Scatterplot* di atas, dapat dilihat titik-titik menyebar secara acak dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data tersebut dan sudah memenuhi uji asumsi klasik.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya $(t-1)$. Untuk mengetahui apakah model regresi terdeteksi ada atau tidak adanya autokorelasi maka salah satu caranya dengan melakukan uji *Durbin-Wiston* (DW test). Berikut adalah hasil uji autokorelasi dengan bantuan *SPSS Statistics* versi 22.

Tabel 3.6
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,086 ^a	,007	-,034	,11688	1,848

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Rumus Durbin-Wiston:

$$\text{Nilai } du < dw < 4-du$$

Lanjutan Tabel 3.6
Hasil Pengujian Asumsi Non-Autokorelasi

Nilai	DI	4-dl	Du	4-du	DW	Interprestasi
100	1,5922	2,4078	1,7582	2,2418	1,848	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel diatas diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* hasil pengujian berada diantara $du < dw < 4-du$ ($1,7582 < 1,848 < 2, 2418$) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi yang terbentuk.

3. Uji Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda adalah regresi dengan dua variabel bebas (misalnya x_1 dan x_2) dan satu variabel terikat (y).¹⁰⁶ Variabel bebas dari peneltian ini adalah kepemilikan institusional (x_1), dewan komisaris independen (x_2), kepemilikan manajerial (x_3) dan komite audit (x_4). Sedangkan variabel terikatnya adalah penghindaran pajak (y). Adapun persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:¹⁰⁷

¹⁰⁶ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 145.

¹⁰⁷Zahriyah, *Diktat Pengajaran*, 54.

$$y = \alpha + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + \beta_4x_4 + e$$

$$y = \alpha + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + \beta_4x_4 + e$$

Keterangan:

y	= Penghindaran pajak
α	= Konstanta
β_1	= Koefisien variabel kepemilikan institusional
x_1	= Kepemilikan institusional
β_2	= Koefisien variabel dewan komisaris independen
x_2	= Dewan komisaris independen
β_3	= Koefisien variabel kepemilikan manajerial
x_3	= Kepemilikan manajerial
β_4	= Koefisien variabel komite audit
x_4	= Komite audit
c	= Error

Hasil dari analisis regresi berganda dengan bantuan *SPSS Statistics* versi 22 pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Persamaan Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,298	,114		2,613	,010
	Kep Institusional	-,060	,121	-,051	-,497	,620
	Kom Independen	,472	,897	,055	,526	,600
	Kep Manajerial	,453	6,617	,007	,069	,946
	Kom Audit	,042	,085	,051	,495	,621

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data diolah SPSS

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$y = \alpha + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + \beta_4x_4 + c$$

$$y = 0,298 - 0,060x_1 + 0,472x_2 + 0,453x_3 + 0,042x_4$$

Dimana:

y = Penghindaran pajak

x₁ = Kepemilikan institusional

x₂ = Dewan komisaris independen

x₃ = Kepemilikan manjerial

x₄ = Komite audit

Dari hasil persamaan regresi linier berganda di atas dapat dijelaskan bahwa:

- a. Nilai konstanta (α) sebesar 0,298 menyatakan bahwa jika nilai kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kepemilikan manejerial dan komite audit konstan (tetap), maka penghindaran pajak adalah sebesar 0,298 artinya berpengaruh positif.
- b. β_1 bernilai negatif sebesar -0,060 menyatakan bahwa jika kepemilikan institusional mengalami kenaikan nilai satu satuan, maka akan mengakibatkan penurunan sebesar 0,060 pada penghindaran pajak dengan asumsi nilai variabel lain tetap.
- c. β_2 bernilai positif sebesar 0,472 menyatakan bahwa jika dewan komisaris independen mengalami kenaikan nilai satu satuan, maka

akan mengakibatkan kenaikan sebesar 0,472 pada penghindaran pajak dengan asumsi nilai variabel lain tetap.

- d. β_3 bernilai positif sebesar 0,453 menyatakan bahwa jika kepemilikan manajerial mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka akan mengakibatkan kenaikan sebesar 0,453 pada penghindaran pajak dengan asumsi nilai variabel lain tetap.
- e. β_4 bernilai positif sebesar 0,042 menyatakan bahwa jika komite audit mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka akan mengakibatkan kenaikan sebesar 0,042 pada penghindaran pajak dengan asumsi nilai variabel lain tetap.

4. Uji Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Variabel independen dikatakan berpengaruh signifikan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau signifikan $< \alpha = 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dengan bantuan *SPSS Statistics* versi 22 pada penelitian ini, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.8
Hasil Uji T (Parsial)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,298	,114		2,613	,010
Kep Institusional	-,060	,121	-,051	-,497	,620
Kom Independen	,472	,897	,055	,526	,600
Kep Manajerial	,453	6,617	,007	,069	,946
Kom Audit	,042	,085	,051	,495	,621

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data diolah SPSS

Adapun nilai t_{tabel} dalam penelitian ini adalah 1,98447. Nilai ini diperoleh dari $t_{tabel} = t(0,05/2 : 100-2)$. $t_{tabel} = t(0,025 : 98)$.

Hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini adalah:

1) H_1 : Kepemilikan institusional (x_1) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (y).

H_0 : Kepemilikan institusional (x_1) berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak (y).

2) H_2 : Dewan komisaris independen (x_2) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (y).

H_0 : Dewan komisaris independen (x_2) berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak (y).

3) H_3 : Kepemilikan manajerial (x_3) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (y).

H_0 : Kepemilikan manajerial (x_3) berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak (y).

4) H_4 : Komite audit (x_4) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (y).

H_0 : Komite audit (x_4) berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak (y).

Berdasarkan data di atas maka diperoleh:

1) Nilai t_{hitung} pada variabel kepemilikan institusional (x_1) adalah sebesar -0,497, sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,98447. Karena t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($t_{hitung} -0,497 < 1,98447 t_{tabel}$) sedangkan tingkat signifikansi $0,620 > 0,05$. Maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

2) Nilai t_{hitung} pada variabel dewan komisaris independen (x_2) adalah sebesar 0,526, sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,98447. Karena t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($t_{hitung} 0,526 < 1,98447 t_{tabel}$) sedangkan tingkat signifikansi $0,600 > 0,05$. Maka H_2 ditolak dan H_0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

3) Nilai t_{hitung} pada variabel kepemilikan manajerial (x_3) adalah sebesar 0,069, sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,98447. Karena t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($t_{hitung} 0,069 < 1,98447 t_{tabel}$) sedangkan tingkat signifikansi $0,946 > 0,05$. Maka H_3 ditolak dan H_0

diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manjerial berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

- 4) Nilai t_{hitung} pada variabel komite audit (x_4) adalah sebesar 0,495, sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,98447. Karena t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($t_{hitung} 0,495 < 1,98447 t_{tabel}$) sedangkan tingkat signifikansi $0,621 > 0,05$. Maka H_4 ditolak dan H_0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan komite audit berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

b. Uji F (Simultan)

Uji f digunakan untuk menguji hipotesis simultan dari variabel independen yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kepemilikan manjerila dan komite audit terhadap variabel dependen penghindaran pajak. Variabel independen dikatakan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen jika $f_{hitung} > f_{tabel}$ atau signifikan $< \alpha = 0,05$. Berikut ini hasil pengujian secara simultan dengan bantuan *SPSS Statistics* versi 22.

Tabel 3.9
Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,101	4	,025	14,672	,000 ^b
Residual	,208	95	,002		
Total	,309	99			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

b. Predictors: (Constant), Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manjerial, Komisaris Independen

Sumber: Data diolah SPSS

Berdasarkan hasil perhitungan pada data diatas, di peroleh nilai F_{tabel} sebesar 2,47. Nilai ini diperoleh dari $F_{tabel} = F(4 : 100-4)$, $F_{tabel} = F(4:96)$.

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa F_{hitung} sebesar 14,672 dengan signifikansi 0,000. Oleh karena itu probabilitas jauh lebih kecil daripada 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($14,672 > 2,47$).

Maka dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel-variabel bebas yang meliputi kepemilikan institusional (x_1), dewan komisaris independen (x_2), kepemilikan manajerial (x_3), dan komite audit (x_4) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penghindaran pajak (y).

c. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Pada regresi berganda, koefisien dari determinasi berganda mempresentasikan proporsi dari variasi y yang dijelaskan oleh seperangkat variabel independen.¹⁰⁸ Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien dterminasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki variasi variabel dependen.¹⁰⁹ Berikut

¹⁰⁸ Efferin, *Metode Penelitian*, 217.

¹⁰⁹ Ikhsan, *Metodologi Penelitian*, 249.

ini tabel uji koefisien determinasi dengan bantuan *SPSS Statistics* versi 22.

Tabel 3.10
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,573 ^a	,328	,306	,04158

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data diolah SPSS

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa besarnya nilai *Adjusted R Square* adalah 0,306. Hal ini dapat diartikan bahwa penghindaran pajak (y) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas atau *independent* yaitu kepemilikan institusional (x_1), dewan komisaris independen (x_2), kepemilikan manajerial (x_3), dan komite audit (x_4) dengan nilai sebesar 30,6%. Sedangkan sisanya (100% - 30,6% = 69,4%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

D. Pembahasan

1. Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

a. Variabel Kepemilikan Institusional

Dari hasil pengujian diperoleh perbandingan yaitu $t_{hitung} -0,497$ dengan tingkat signifikansi 0,620. Karena $t_{hitung} -0,497 < 1,98447 t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi 0,620 > 0,05. Kesimpulannya adalah “Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Penghindaran

Pajak.” Dapat dikatakan bahwa hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama.

Hasil Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dina Marfirah dan Syam Fazli Bz (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini menyatakan bahwa penghindaran pajak dapat mengurangi transparansi perusahaan dan menyebabkan *information asymmetry* dan menciptakan *moral hazard*. Untuk itulah perlunya diterapkan *corporate governance* di perusahaan. Dengan adanya kepemilikan institusional maka terdapat kontrol yang lebih baik. Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih baik.

Berdasarkan hasil hipotesis pertama dapat disimpulkan bahwa semakin tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial, sehingga dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan *debt holder*.

b. Variabel Dewan Komisaris Independen

Dari hasil pengujian diperoleh perbandingan yaitu t_{hitung} 0,526 dengan tingkat signifikansi 0,600. Karena t_{hitung} 0,526 < 1,98447 t_{tabel} dengan tingkat signifikansi 0,600 > 0,05. Kesimpulannya adalah “Dewan Komisaris Independen berpengaruh tetapi tidak signifikan

terhadap Penghindaran Pajak.” Dapat dikatakan bahwa hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis kedua.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yoli Oktafiani Sari (2016) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian ini menyatakan terdapat beberapa hal yang diduga menjadi alasan mengapa besarnya proporsi dewan komisaris independen berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Pertama, tidak semua anggota dewan komisaris independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Kedua, kemampuan komisaris independen dalam rangka memantau proses keterbukaan dan penyediaan informasi akan terbatas apabila pihak-pihak terafiliasi yang ada di perusahaan lebih mendominasi dan dapat mengendalikan dewan komisaris independen kurang tanggap dalam memperhatikan ada atau tidaknya penghindaran pajak atau pajak agresif dalam perusahaan sehingga melalaikan kewajibannya kepada negara terutama pajak.

Berdasarkan hasil hipotesis kedua dapat disimpulkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak dapat mengatasi praktik penghindaran pajak karena tidak dilibatkan dalam pengambilan

keputusan terkait kewajiban perpajakan dan belum maksimal untuk menjalankan fungsi pengawasan sehingga hal ini memberikan kesempatan bagi manajer perusahaan untuk melakukan aktivitas manipulasi laba yang nantinya akan menguntungkan perusahaan dalam hal perpajakan.

c. Variabel Kepemilikan Manajerial

Dari hasil pengujian diperoleh perbandingan yaitu t_{hitung} 0,069 dengan tingkat signifikansi 0,946. Karena t_{hitung} 0,069 < 1,98447 t_{tabel} dengan tingkat signifikansi 0,946 > 0,05. Kesimpulannya adalah “Kepemilikan Manajerial berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak.” Dapat dikatakan bahwa hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nindy Meiza Utari (2016) yang menyatakan bahwa proporsi kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini menyatakan semakin besar proporsi kepemilikan oleh manajerial maka semakin kuat konsentrasi manajerial terhadap perusahaan. Semakin besar proporsi yang dimiliki pihak manajerial, semakin termotivasi untuk mendapatkan laba yang besar, menjadikan strategi pajak yang diambil agresif. Maka dengan semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan, penghindaran pajak perusahaan akan semakin tinggi.

Berdasarkan hasil hipotesis ketiga dapat disimpulkan bahwa besarnya proporsi kepemilikan manajerial didalam perusahaan mampu membuat manajerial memanfaatkan peluang untuk melakukan penghindaran pajak agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

d. Variabel Komite Audit

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh perbandingan yaitu t_{hitung} 0,495 dengan tingkat signifikansi 0,621. Karena t_{hitung} 0,495 < 1,98447 t_{tabel} dengan tingkat signifikansi 0,621 > 0,05. Kesimpulannya adalah “Komite Audit berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak.” Dapat dikatakan bahwa hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis ke empat.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayana (2017) yang menyatakan bahwa latar belakang keahlian akuntansi atau komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini menyatakan Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan, selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Keberadaan komite audit dimaksudkan untuk memberikan pendapat professional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian

dewan komisaris. Diperlukan keahlian dalam hal akuntansi, perpajakan, dan peraturan hukum untuk dapat melakukan penghindaran pajak dengan cara legal.

Keahlian akuntansi atau keuangan yang dimiliki oleh anggota komite audit akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil dalam melakukan penghindaran pajak karena mereka lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dan cara yang menghindari risiko deteksi, sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk melakukan penghindaran pajak dan menghasilkan keuntungan lebih besar bagi pemegang saham.

Berdasarkan hasil hipotesis ke empat dapat disimpulkan bahwa komite audit masih belum dapat mengatasi praktik penghindaran pajak.

Hal ini dapat terjadi karena pembentukan struktur dan pemilihan personil komite audit merupakan tanggung jawab dari dewan komisaris, jika dewan komisaris melakukan penyalahgunaan wewenang maka akan berdampak ke pekerjaan komite audit yang terbatas dalam pengawasan praktik penghindaran pajak.

2. Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen Secara Simultan

Berdasarkan perhitungan Uji F dapat dilihat bahwa variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Terbukti dari hasil perhitungan *SPSS*

Statistics versi 22 bahwa nilai F_{hitung} sebesar 14,672 dengan tingkat signifikansi 0,000 dan F_{tabel} 2,47. Maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($14,672 > 2,47$) dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ yang artinya H_a diterima dan H_0 ditolak.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rabiatus Salamah (2018) yang menyatakan bahwa variabel independen yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak secara simulta.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkannya bahwa variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* yang di proksikan dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan komite audit terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia pada tahun 2016-2019, maka kesimpulan dalam penelitian ini yang sebagai berikut:

1. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan kriteria uji hipotesis yaitu $t_{hitung} -0,497 < 1,98447 t_{tabel}$ sedangkan tingkat signifikansi $0,620 > 0,05$. Maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional (x_1) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (y). Namun Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dina Marfirah dan Syam Fazli Bz (2016).

2. Pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan kriteria uji hipotesis yaitu $t_{hitung} 0,526 < 1,98447 t_{tabel}$ sedangkan tingkat signifikansi $0,600 > 0,05$. Maka H_2 ditolak dan H_0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen (x_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran

pajak (y). Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yoli Oktafiani Sari (2016).

3. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan kriteria uji hipotesis yaitu $t_{hitung} 0,069 < 1,98447 t_{tabel}$ sedangkan tingkat signifikansi $0,946 > 0,05$. Maka H_3 ditolak dan H_0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial (x_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (y). Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nindy Meiza Utari (2016).

4. Pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan kriteria uji hipotesis yaitu $t_{hitung} 0,495 < 1,98447 t_{tabel}$ sedangkan tingkat signifikansi $0,621 > 0,05$. Maka H_4 ditolak dan H_0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komite audit (x_4) tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (y). Penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayana (2017).

5. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan

Berdasarkan perhitungan Uji F dari hasil perhitungan *SPSS Statistics* versi 22 diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 14,672 dengan tingkat signifikansi 0,000 dan $F_{tabel} 2,47$. Maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($14,672 > 2,47$) dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rabiatus Salamah (2018)

Berdasarkan kesimpulan diatas diperoleh bahwa penelitian ini mendukung dengan adanya teori *good corporate governance* bahwa tata kelola perusahaan yang baik akan menekan kecenderungan pihak-pihak perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak perusahaan.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini terdapat saran yang bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Manajer Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk meminimalkan dalam melakukan penghindaran pajak. Dan juga dapat lebih meningkatkan lagi penerapan *corporate governance* agar berjalan lebih baik lagi di perusahaan.

2. Bagi Investor

Bagi investor apabila ingin berinvestasi sebaiknya lebih memilih perusahaan yang telah menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik dan taat terhadap pajak agar dapat menstabilkan prekonomian dalam negeri.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah periode waktu, agar hasil penelitian mampu mempresentasikan populasi dengan baik.
- b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memasukkan sektor perusahaan lain selain sektor perbankan agar hasil penelitian menjadi lebih baik lagi.

- c. Penelitian selanjutnya yang akan mengadakan penelitian sejenis diharapkan dapat memasukkan variabel lainnya yang belum diamati dalam penelitian ini.
- d. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan alat ukur lain untuk mengukur seberapa agresif suatu perusahaan dalam menghindari pemabayaran pajak seperti *effective tax rate* (ETR), *current effective tax rate* (CUETR), dan *boox-tax difference* (BTD)



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, N. S., & Holland, K. 2016. Tax Planning, Corporate Governance And Equity Value. *British Accounting Review*, 44(2), 111–124.
- Annisa, N. A., dan Kurniasih, L. 2016. Pengaruh Corporate Governace terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 8(2), 95-189.
- Bambang Prasetyo, 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Boediono, Gideon, SB. 2015 “*Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur*”. Solo: SNA VIII.
- Cahyono, Dyas. Deddy., Rita Andini, dan Kharis Raharjo. 2016. “Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) Dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011 – 2013.” *Journal Of Accounting* 2(2).
- Darmawati. 2016. *Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Pewrusahaan*. Simposium Nasional Akuntansi VII, Denpasar.
- Fadhilah, Rahmi. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011)*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. 2017.
- Herawati, Vinola. *Peran Praktek Corporate Governance Sebagai Moderating Variabel dari Pengukuran Earnings Management terhadap Nilai Perusahaan*. Pontianak: SNA XI. 2017.
- Imam Ghozali. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Istijanto. 2009. *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Jati, Wisamodro, dkk. 2015. *Studi Penghindaran Pajak: Kegiatan Jasa Perbankan di Indonesia*. Responsi Bank Indonesia.
- Jonathan Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan*. Jakarta:Rajawali Press.
- Mangunsong, Soddin. 2017. *Penerapan Tax Planning Dalam Mengefisienkan Pembayaran Pajak Penghasilan*.
- Mohammad Zain. 2003. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad Nasrum Akal dan Andi Tenri Ulang Akal. 2017. *Corporate Governance (Konsep, teori dan aplikasi di beberapa Negara Asia)*. Pustaka Salewanagan Maros.
- Natrion. 2017. *Pengaruh Corporate Manajemen Terhadap Manajemen Pajak. Prosiding Seminat Nasional Inovasi telnologi-SNTTek 2017*, ISSN 2580-5495.
- Ningsih, Fitria Winda dan Mildawati, Titik. 2017 *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan*. Simposium Nasional Akuntansi XX, Jember.
- Oktafiani Sari, Yoli, 2016. *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak*. Universitas Andalas. Padang.
- Puspita, S. R. 2016. *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi terhadap Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012)*. Universitas Diponegoro.
- Putranti, Titi Muswati. 2016. Jati, Wisamodoro & Tambunan, Maria. *Studi Penghindaran Pajak (Kegiatan Jasa Perbankan di Indonesia)*. Study Case Indonesia.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Solihin, I. 2009. *Corporate Social Responsibility: from Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2008 *.Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Penulisaian Karya Ilmiah*; Jember: IAIN Press.
- Uhar Suharsaputra. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, Bandung: PT Refika Aditama.

Waluyo, 2010 *Perpajakan Indonesia*. Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat.

Wiratna Sujarweni V, 2019. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi* ,
Yogyakarta: Pustaka baru Press.

<http://www.idx.co.id>

<http://www.pajak.go.id>



Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Hipotesis	Rumusan Masalah
Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	1. Kepemilikan Institusional (X_1). 2. Dewan Komisaris Independen (X_2) 3. Kepemilikan Manajerial (X_3). 4. Komite Audit (X_4) 5. Penghindaran Pajak (Y)	1. Kepemilikan Institusional (X_1) $INST = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Oleh Institusi}}{\text{Seluruh Modal Saham Perusahaan}}$ 2. Dewan Komisaris Independen (X_2) $KOI = \frac{\text{Jumlah Anggota Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}}$ 3. Kepemilikan Manajerial (X_3) $KPM = \frac{\text{Jumlah Saham Yang dimiliki Manajemen}}{\text{Modal Saham Perusahaan}}$	Data Sekunder : 1. Dokumentasi 2. Website BEI	1. Pendekatan penelitian: kuantitatif 2. Jenis penelitian: analisis statistik deskriptif 3. Penentuan sampel : <i>purposive sampling</i> 4. Metode Analisis Data : a. Statistic Deskriptif b. Uji Asumsi Klasik 1) Uji Normalitas 2) Uji Multikolin earitas 3) Uji Autokorelasi 4) Uji Heteroskedastisitas c. Uji Hipotesis 1) Uji Statistik t 2) Uji	H1: Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. H2: Pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. H3: Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. H4: Pengaruh komite audit terhadap penghindaran	1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan? 2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan? 3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan? 4. Apakah latar belakang keahlian akuntansi atau komite audit berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan?

		<p>4. Komite Audit (X_4)</p> <p>Jumlah Anggota Yang Memiliki Latar Belakang Akuntansi/Keuangan</p> $KOMA = \frac{\text{Jumlah Anggota Komite Audit}}{\text{Jumlah Anggota Komite Audit}}$ <p>5. Penghindaran Pajak (Y)</p> <p>Pembayaran Pajak</p> $CETR = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$		<p>Statistik F</p> <p>3) Koefisien Determinasi (R^2)</p>	n pajak.	
--	--	---	--	---	----------	--

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. WILDAN VIRDAUSI
Nim : E20163008
Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016-2019**" adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 28 September 2020
Saya yang menyatakan



M. WILDAN VIRDAUSI
NIM. E20163008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iam-jember.ac.id

Nomor : B- /In.20/7.a/PP.00.9/09/2020
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth.

Kepala Laboratorium FEBI IAIN Jember

di-

TEMPAT

Diberitakan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut:

Nama Mahasiswa : M. WILDAN VIRDAUSI
NIM : E20163008
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah
No. Telpn : 085732770292
Dosen Pembimbing : Daru Anondo, S.E., M.Si.
NIP : 197503032009011009
Judul Penelitian : Pengaruh *Corporate Governace* Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016-2019

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhentian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jember, 11 September 2020

a.n. Dekan,

Abdul Rokhim Wakil Dekan Bidang Akademik



Abdul Rokhim



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
Fax (0331) 427005, Web: www.iain-jember.ac.id, email: info@iain-jember.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- /In.20/7.a/PP.00.9/09/2020

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Merujuk Surat nomor B- /In.20/7.a/PP.00.9/09/2020 dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas berikut:

Nama : M. WILDAN VIRDAUSI
NIM : E20163008
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016-2019

Telah selesai melakukan penelitian dengan pengambilan data sekunder dari *website* BEI dan perusahaan terkait selama tanggal 11-28 September 2020 dalam rangka untuk penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jember, 29 September 2020

Mengetahui,

Kepala Laboratorium
IAIN Jember



Toton Fansurna, M.E.I

NIP. 18911224 201101 1 008

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	TANGGAL	JURNAL KEGIATAN
1.	11 September 2020	Menyerahkan surat izin penelitian
2.	14 September 2020	Diterima penelitian
3.	15 September 2020	Melakukan Penelitian
4.	18 September 2020	Melakukan Penelitian
5.	22 Septemebr 2020	Melakukan Penelitian
6.	25 September 2020	Melakukan Penelitian
7.	29 September 2020	Meyerahkan surat izin selesai penelitian



TABEL PENELITIAN

Tabel 1.1
Indikator Penelitian

Variabel	Indikator
Kepemilikan Institusional	$\text{INST} = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Oleh Institusi}}{\text{Seluruh Modal Saham Perusahaan}}$
Dewan Komisaris Independen	$\text{KOI} = \frac{\text{Jumlah Anggota Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}}$
Kepemilikan Manajerial	$\text{KPM} = \frac{\text{Jumlah Saham Yang dimiliki Manajemen}}{\text{Modal Saham Perusahaan}}$
Komite Audit	$\text{KOMA} = \frac{\text{Jumlah Anggota Yang Memiliki Latar Belakang Akuntansi/Keuangan}}{\text{Jumlah Anggota Komite Audit}}$
Penghindaran Pajak	$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$

Sumber: Data diolah

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan

No	Nama peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Vivi Adeyani (2016). Institute Bussines and Informatics Kwik Kian Gie.	The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance : An Empirical Study on Manufacturing in IDX period 2010-2013.	<ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis: Regresi linier berganda. • Jenis penelitian: Kuantitatif. • Sumber data: Data sekunder. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sampel: 120 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013. • Variabel lain: Kompensasi

				Eksekutif, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, dan Kualitas Audit
2.	Dina Marfirah dan Syam Fazli Bz (2016). Universitas Syiah Kuala.	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan Leverage terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2015.	<ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis: Regresi linier berganda. • Jenis penelitian: Kuantitatif. • Sumber data: Data skunder. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sampel: 132 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. • Variabel lain: Quality Avoidance dan leverage
3.	Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2016). Universitas Pandanaran.	Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Listing Bursa Efek Indonesia periode Tahun 2011-2013.	<ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis: Regresi linier berganda. • Jenis penelitian: Kuantitatif. • Sumber data: Data sekunder 	<ul style="list-style-type: none"> • Sampel: 23 Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia • Variabel lain: Ukuran Perusahaan, leverage dan Profitabilitas.
4.	Yoli, Oktafiani Sari (2016). Universitas Andalas.	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitian: Kuantitatif. • Sumber data : Data sekunder. • Metode analisis: Regresi linier berganda 	<ul style="list-style-type: none"> • Sampel: Seluruh Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. • Variabel lain: Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Kualitas Audit.
5.	Nindy, Meiza Utari (2016). Universitas Andalas.	Pengaruh Corporate Governance Terhadap Upaya Penghindaran Pajak Perusahaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis: Regresi linier berganda. • Jenis penelitian: Kuantitatif. • Sumber data: Data sekunder. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sampel: 21 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. • Variabel lain:

				Kompensasi Eksekutif.
6.	Hidayana (2017). Universitas Lampung Bandar Lampung.	Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015.	<ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis: Regresi linier berganda. • Jenis penelitian: Kuantitatif. • Sumber data: Data sekunder. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sampel: Sebanyak 137 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. • Variabel lain: Kompensasi Eksekutif, Keuanagn Komite audit.
7.	Tati Yulia Okrayanti, Supri Wahyudi Utomo, Elva Nuraina (2017). Universitas PGRI Madiun.	Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Tax avoidance (Studi pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia).	<ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis: Regresi linier berganda. • Jenis penelitian: Kuantitatif. • Sumber data: Data sekunder. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sampel: Sebanyak 100 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. • Variabel lain: Leverage dan Intensitas Modal.
8.	Natrion (2017). Universitas Satya Negara Indonesia.	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Pajak.	<ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis: Regresi linier berganda. • Jenis penelitian: Kuantitatif. • Sumber data: Data sekunder. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sampel: 30 perusahaan yang terdaftar di BEI. • Variabel lain: Kompensasi dan Manajemen Pajak.
9.	Winda Fitria Ningsih dan Titik Mildawati (2017). Universitas Jember.	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis: Regresi linier berganda. • Jenis penelitian: Kuantitatif. • Sumber data: Data sekunder 	<ul style="list-style-type: none"> • Sampel: 48 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. • Variabel lain: Pengaruh kepemilikan manajerial, institusional, komite audit, komisaris independen dan <i>tax avoidance</i>..
10.	Robiatus Salamah (2018). Universitas Islam Negeri Maulana	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap	<ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis: Regresi linier berganda. • Jenis penelitian: 	<ul style="list-style-type: none"> • Sampel: Sebanyak 45 perusahaan yang terdaftar di BEI. • Variabel lain:

Malik Ibrahim.	Penghindaran Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar di LQ45.	Kuantitatif. • Sumber data: Data sekunder.	Pengaruh kepemilikan manajerial, institusional, komisaris independen terhadap Tax Avoidance.
----------------	---	---	--

Sumber: Data diolah

Tabel 3.1
Pengambilan Sampel dengan *Purposive Sampling*

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2019	25
2.	Perusahaan yang mengalami <i>delisting</i> selama periode 2016-2019	(0)
3.	Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan selama tahun 2016-2019	(0)
4.	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan yang dinyatakan dalam rupiah dan berakhir pada tanggal 31 desember selama periode pengamatan tahun 2016-2019	(0)
5.	Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data variabel-variabel yang digunakan.	(0)
	Jumlah perusahaan yang digunakan	25
	Total keseluruhan sampel selama 4 tahun (25x4)	100

Sumber: data sekunder yang diperoleh

Tabel 3.2
Daftar Nama Perusahaan

No.	PERUSAHAAN	KODE
1.	Bank Artha Graha Internasional Tbk.	INPC
2.	Bank Central Asia Tbk.	BBCA
3.	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	BBNI
4.	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	BBRI
5.	Bank Cimb Niaga Tbk.	BNGA
6.	Bank Danamon Indonesia Tbk.	BDMN

7.	Bank Maybank Indonesia Tbk.	BNII
8.	Bank Mandiri Tbk.	BMRI
9.	Bank Permata Tbk.	BNLI
10.	Bank Mega Tbk.	MEGA
11.	Bank Harda Internasional Tbk.	BBHI
12.	Bank Mayapada Internasional Tbk.	MAYA
13.	Bank Pan Indonesia Tbk.	PNBN
14.	Bank Bukopin Tbk.	BBKP
15.	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	BBTN
16.	Bank Tabungan Pensiunan National Tbk.	BTPN
17.	Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.	MCOR
18.	Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.	SDRA
19.	Bank Sinarmas Tbk.	BSIM
20.	Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.	AGRO
21.	Bank IBK Indonesia Tbk	AGRS
22.	Bank Yudha Bhakti Tbk.	BBYB
23.	Bank MNC Internasional Tbk.	BABP
24.	Bank Ina Perdana Tbk.	BINA
25.	Bank Mestika Dharma Tbk.	BBMD

Sumber: data diolah

Tabel 3.3
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan Institusional	100	0,5782	1,0000	0,899661	0,0977034
Komisaris Independen	100	0,0000	0,0479	0,002821	0,0102609
Kepemilikan Manajerial	100	0,0000	0,0117	0,000390	0,0016409
Komite Audit	100	0,2	0,8	0,448	0,1382
Tax Avoidance	100	0,02	0,92	0,2685	0,11491
Valid N (listwise)	100				

Tabel 3.4
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,05277760
Most Extreme Differences	Absolute	,082
	Positive	,056
	Negative	-,082
Test Statistic		,082
Asymp. Sig. (2-tailed)		,098 ^c

Tabel 3.5
Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1			
	Kep Institusional	,986	1,014
	Kom Independen	,940	1,064
	Kep Manajerial	,952	1,051
	Kom Audit	,994	1,006

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Tabel 3.6
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,086 ^a	,007	-,034	,11688	1,848

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Lanjutan Tabel 3.6
Hasil Pengujian Asumsi Non-Autokorelasi

Nilai	DI	4-dl	Du	4-du	DW	Interprestasi
100	1,5922	2,4078	1,7582	2,2418	1,848	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Data diolah peneliti

Tabel 3.7
Persamaan Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,298	,114		2,613	,010
	Kep Institusional	-,060	,121	-,051	-,497	,620
	Kom Independen	,472	,897	,055	,526	,600
	Kep Manajerial	,453	6,617	,007	,069	,946
	Kom Audit	,042	,085	,051	,495	,621

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data diolah SPSS

Tabel 3.8
Hasil Uji T (Parsial)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,298	,114		2,613	,010
	Kep Institusional	-,060	,121	-,051	-,497	,620
	Kom Independen	,472	,897	,055	,526	,600
	Kep Manajerial	,453	6,617	,007	,069	,946
	Kom Audit	,042	,085	,051	,495	,621

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data diolah SPSS

Tabel 3.9
Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,101	4	,025	14,672	,000 ^b
	Residual	,208	95	,002		
	Total	,309	99			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

b. Predictors: (Constant), Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial,

Komisaris Independen

Sumber: Data diolah SPSS

Tabel 3.10
Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,573 ^a	,328	,306	,04158

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

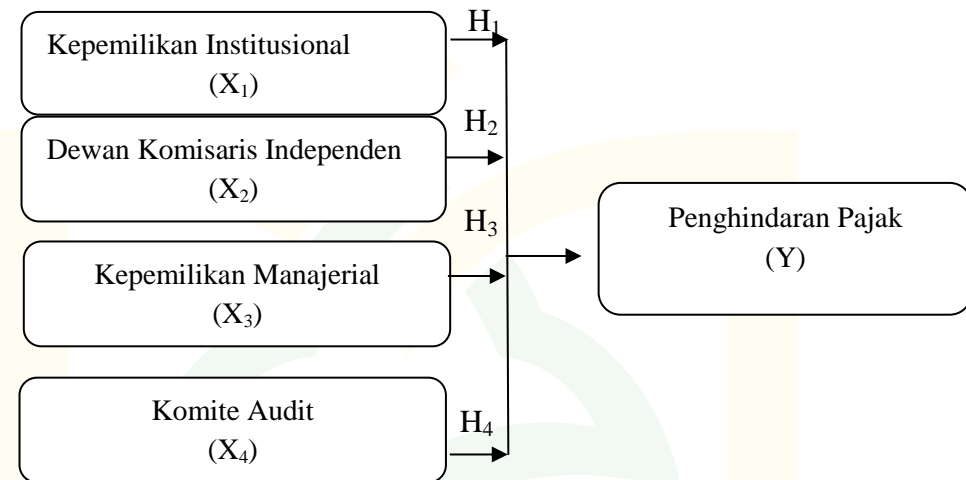
Sumber: Data diolah SPS

IAIN JEMBER

GAMBAR PENELITIAN

Gambar 1.1

Kerangka Konseptual



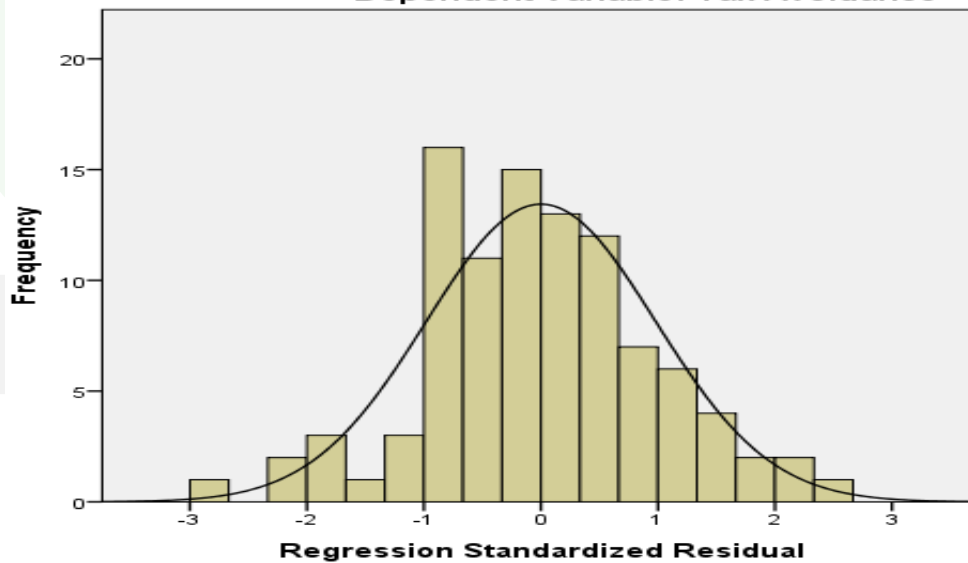
Sumber: Data diolah

Gambar 3.1

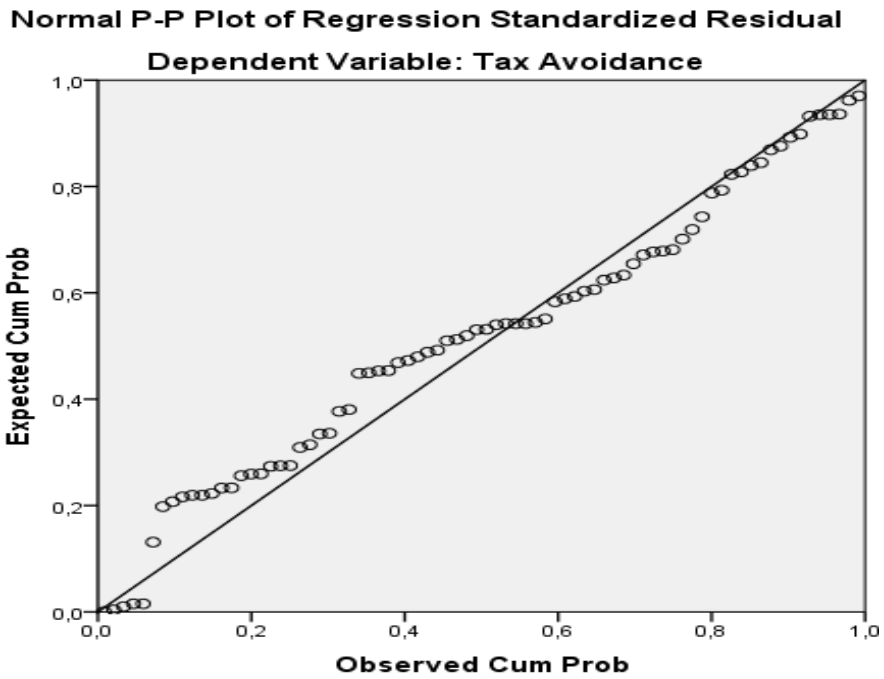
Uji Normalitas

Histogram

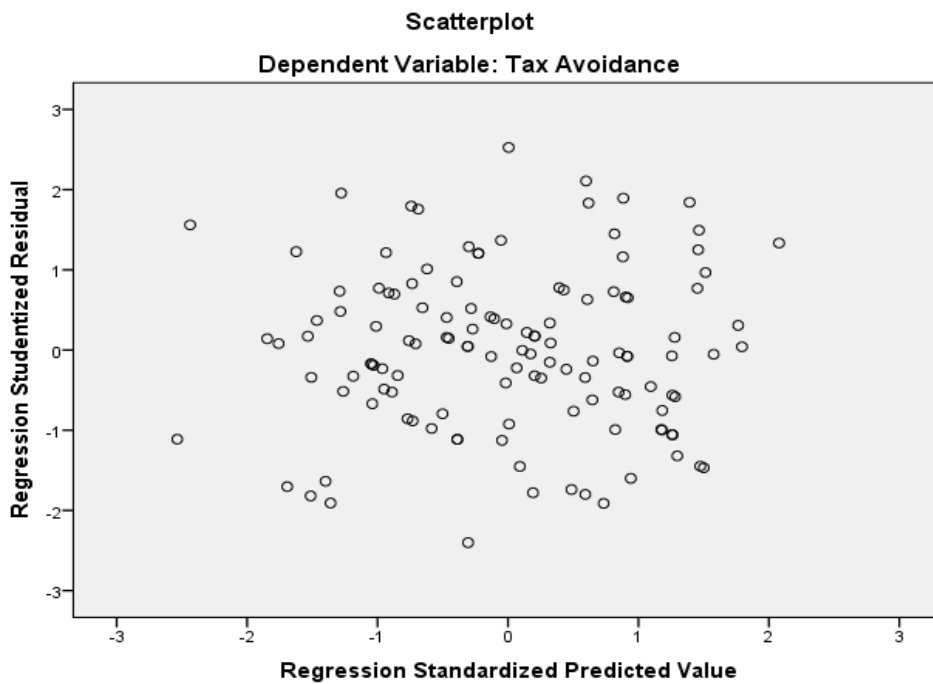
Dependent Variable: Tax Avoidance



Gambar 3.2
Uji Normalitas



Gambar 3.3
Uji Heteroskedastisitas



BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : M. Wildan Virdausi
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 01 Maret 1998
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Alamat : Dsn. Kedungsuko RT 003 RW 030 Ds.Bangsalsari
Kec. Bangsalsari Kab. Jember Prov. Jawa Timur
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : WNI
No. Hp : 085732770292
Email : wildanvirdausi60@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri 2 Bangsalsari (2004 – 2010)
2. SMP/Mts : SMP Negeri 1 Bangsalsari (2010 - 2013)
3. SMA/MA : SMA Negeri 1 Tanggul (2013 - 2016)
4. Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Jember (2016 - 2021)

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Osis SMA Negeri 1 Tanggul Tahun 2013 - 2014
2. Anggota HMPS Akuntansi Syariah IAIN Jember Tahun 2016 – 2019
3. Unit Kegiatan Olahraga (UKOR) IAIN Jember Tahun 2016 – 2017
4. PMII Komisariat IAIN Jember Tahun 2016-2021